



SALINAN

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib arsip di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, perlu disusun klasifikasi arsip sebagai pedoman dalam penciptaan, pengendalian, penggunaan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- b. bahwa ketentuan mengenai klasifikasi arsip yang berlaku di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan pengaturan mengenai kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
5. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
7. Unit Organisasi adalah komponen organisasi di lingkungan Kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
8. Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
9. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

10. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Organisasi Internasional Non- Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan bagi Unit Organisasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis;
- b. menciptakan keseragaman dalam penggunaan Klasifikasi Arsip;
- c. mewujudkan tata kelola Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Unit Kerja;
- d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali Arsip; dan
- e. menunjang kodifikasi dalam pemberkasan Arsip Dinamis di dalam sistem pemberkasan.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 4

- (1) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi fungsi:
 - a. perencanaan;
 - b. organisasi dan tata laksana;
 - c. keuangan;
 - d. kepegawaian;
 - e. perlengkapan;
 - f. kehumasan;
 - g. hukum;
 - h. pendidikan dan pelatihan;
 - i. teknologi informasi dan komunikasi;
 - j. kearsipan;
 - k. kepustakaan; dan
 - l. pengawasan.
- (2) Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi fungsi:
 - a. hubungan bilateral intrakawasan dan antarkawasan;
 - b. kerja sama ASEAN;
 - c. penanganan isu internasional;
 - d. hukum dan perjanjian internasional;
 - e. informasi dan diplomasi publik;
 - f. keamanan diplomatik;
 - g. protokol dan konsuler; dan
 - h. strategi kebijakan luar negeri.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. analisis fungsi;
 - b. analisis kegiatan;
 - c. analisis transaksi; dan
 - d. penyusunan skema klasifikasi.
- (2) Analisis fungsi, analisis kegiatan, dan analisis transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara konstruktif dan sistemik untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih antara

fungsi, kegiatan, dan transaksi.

- (3) Analisis fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara logis, faktual, relevan, aktual, sistematis, akomodatif dan kronologis.
- (4) Penyusunan skema klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memudahkan penjabaran uraian fungsi dan tugas secara logis, faktual, perbaikan berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis.

Pasal 6

- (1) Skema klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Skema klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk berjenjang yang meliputi:
 - a. nama atau judul fungsi;
 - b. nama kegiatan; dan
 - c. nama transaksi kegiatan.

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan berdasarkan Kode Klasifikasi Arsip.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. huruf; dan
 - b. kombinasi huruf dan angka.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.
- (4) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Lampiran III Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Plt. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan



Dian Kusumatingsih

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

KODE KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

A. FUNGSI FASILITATIF

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
1	PR.	PERENCANAAN	
	PR.01	Perumusan Kebijakan dan Strategi Pembangunan	
	PR.01.01	Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP).
	PR.01.02	Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PR.01.03	Rencana Strategis (Renstra)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan Rencana Strategis (Renstra).
	PR.02	Penyusunan Program/Rencana Kerja	
	PR.02.01	Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan (KAK/RAB)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kegiatan meliputi: KAK/RAB.
	PR.02.02	Penyusunan Program/Rencana Kerja Tahunan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Program/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian dan Perwakilan.
	PR.02.03	Penyusunan Rencana Kerja berdasar Pagu Indikatif	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja Berdasar Pagu Indikatif.
	PR.02.04	Penyusunan Program dan Anggaran Berdasar Inisiasi Baru	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Program dan Anggaran Berdasar inisiasi baru.
	PR.03	Perencanaan Anggaran	
	PR.03.01	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan. pemberian panduan dan pedoman perencanaan dan penyusunan rencana kerja anggaran, meliputi RKAKL Pagu Indikatif, RKAKL Pagu Definitif, Surat Rincian Alokasi Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Murni dan POK Awal.
	PR.03.02	Rencana Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, pemberian panduan dan pedoman perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP).

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PR.03.03	Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, pemberian panduan dan pedoman perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL).
	PR.03.04	Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian kepada DPR RI	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan penyampaian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian kepada DPR RI.
	PR.03.05	Perumusan Usulan Standar Biaya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi perumusan usulan standar biaya, meliputi: usulan standar harga satuan perencanaan barang (SHSPB), usulan standar biaya khusus, usulan standar biaya masukan dan biaya keluaran.
	PR.03.06	Revisi DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi penyusunan dan pemberian panduan dan pedoman, pengusulan dan penelitian revisi anggaran.
	PR.03.07	Anggaran Biaya Tambahan (ABT)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi penyusunan dan pemberian panduan dan pedoman, pengusulan dan penelitian Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
	PR.04	Perjanjian Kinerja / Penetapan / Kontrak Kerja	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi penyusunan dan pemberian panduan/pedoman penyusunan perjanjian/kontrak kinerja, pelaporan kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja dan program kegiatan serta kinerja anggaran.
	PR.05	Pelaporan dan Evaluasi	
	PR.05.01	Laporan Berkala	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan yang meliputi: laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, laporan tahunan knit Kerja, laporan tahunan kementerian.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PR.05.02	Laporan Insidental/khusus	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan insidental/khusus.
	PR.05.03	Laporan Perkembangan (<i>Progress Report</i>)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan perkembangan (<i>Progress Report</i>) untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun.
	PR.05.04	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
	PR.05.05	Penyusunan Ketentuan/Peraturan Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Petunjuk/Peraturan Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
	PR.05.06	Laporan Hasil Evaluasi Program/Anggaran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan Hasil Evaluasi Program atau Anggaran.
2	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
	OT.01	Penataan Kelembagaan	
	OT.01.01	Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Perwakilan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, penataan organisasi dan tata kerja dan pemberian panduan dan pedoman di bidang penataan organisasi di Perwakilan Republik Indonesia, fasilitas pembukaan hubungan diplomatik, pembentukan, pengubahan, pembubaran/restrukturisasi dan penutupan kantor perwakilan Republik Indonesia serta pengaturan pejabat penugasan serta lembaga teknis pada Perwakilan Republik Indonesia.
	OT.01.02	Analisis dan Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Perwakilan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi analisis dan evaluasi kelembagaan.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	OT.02	Penata Tata Laksana dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
	OT.02.01	Penyusunan dan Penyelarasan Proses Bisnis	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi ketatalaksanaan, penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur kerja.
	OT.02.02	Pelaksanaan Evaluasi dan Proses Bisnis	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pemantauan dan evaluasi ketatalaksanaan, penyusunan proses bisnis.
	OT.02.03	Penyusunan dan penyelarasan SOP	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ketatalaksanaan meliputi pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan penyelarasan SOP.
	OT.02.04	Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pemantauan dan evaluasi ketatalaksanaan, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur kerja.
	OT.02.05	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan data dan dokumen reformasi birokrasi.
	OT.03	Analisis dan Evaluasi Jabatan	
	OT.03.01	Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan Struktural	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan serta pemberian panduan/pedoman mengenai informasi jabatan dan analisis jabatan, uraian tugas dan spesifikasi atau persyaratan jabatan struktural
	OT.03.02	Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan Fungsional Tertentu	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian panduan/pedoman mengenai informasi jabatan dan analisis jabatan, uraian tugas dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional tertentu

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	OT.03.03	Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan Fungsional Umum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan serta pemberian panduan/pedoman mengenai informasi jabatan dan analisis jabatan, uraian tugas dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional Umum
	OT.03.04	Analisis Beban Kerja	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan serta pemberian panduan/pedoman mengenai perhitungan analisis beban kerja dan pemetaan kekuatan pegawai di unit kerja.
	OT.03.05	Evaluasi Jabatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi analisis dan evaluasi jabatan.
3	KU.	KEUANGAN	
	KU.01	Perencanaan Anggaran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan penyusunan anggaran yang meliputi Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Bapenas mengenai Pagu Indikatif, Kesepakatan bersama Menteri Keuangan dengan DPR mengenai Pagu Definitif, Kerja Anggaran (RKA) Kementerian /Lembaga Negara, Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara, Penyusunan RAPBN, Penyampaian RAPBN kepada DPR, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Keputusan Presiden tentang Rincian APBN, DIPA, RUU-APBN-P, Notulen Pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR, Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P, UU APBN-P dan Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P.
	KU.02	Pelaksanaan Anggaran	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KU.02.01	Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan menyangkut pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran.
	KU.02.02	Realisasi Pendapatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja (SSPB), Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank, Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja, Dokumen Piutang Negara dan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara.
	KU.03	Belanja/Pengeluaran Anggaran	
	KU.03.01	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran pelaksanaan pengadaan barang /jasa meliputi: Barang Habis Pakai, Barang Inventaris, Jasa, <i>Software</i> Komputer.
	KU.03.02	Pembayaran Keuangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen pembayaran keuangan meliputi: Pengajuan Keputusan Penarikan Kas, Bukti-bukti tagihan dari pihak ketiga, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencaitan Dana (SP2D) Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA), Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) dan Beban Pusat Perjalanan Dinas (BP Jaldis).

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KU.03.03	Tata Usaha Anggaran	Arsp atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Tata Usaha Anggaran meliputi: Buku Kas Umum (BKU), Buku kas Pembantu, Buku/Karto Pengawasan Kredit Anggaran. Rekening Koran Bank, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK), Daftar Rekapitulasi Pihak Ketiga, Daftar Rekapitulasi PNBPN, Ijin Penggunaan Kas Besi.
	KU.03.04	Daftar Gaji	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Daftar, Gaji, Tunjangan/Lembur.
	KU.03.05	Kartu Gaji	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Kartu Gaji.
	KU.03.06	Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI	Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional.
	KU.03.07	Akutansi Keuangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan Akutansi Keuangan meliputi: Berita Acara Pemeriksaan Kas, Kas/Register Penutupan Kas, Arsip Data Komputer (ADK), Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan KPPN.
	KU.03.08	Verifikasi Anggaran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan Verifikasi Anggaran meliputi: Nota Hasil Verifikasi (NHV), Jawaban Nota Hasil Verifikasi (JNHV).
	KU.03.09	Laporan Keuangan Tahunan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Barang Milik Negara (BMN), Laporan Realisasi Pendapatan Negara.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KU.04	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Daftar Proyek-proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>), Dokumen Kesanggupan negara donor membiayai (<i>Green Book</i>), Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan sejenisnya, Dokumen <i>Loan Agreement</i> , Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN, <i>Legal opinion</i> , Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan <i>Lender</i> , Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>), Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor (<i>Replenishment</i>), <i>Staff Appraisal Report</i> , <i>Report/Laporan</i> , Laporan Hutang Negara dan Keterangan yang menyangkut Pinjaman /Hibah Luar Negeri.
	KU.05	Pengelola APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelola APBN untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Pengelola Barang, termasuk berita acara serah terima jabatan.
	KU.06	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Kebijakan Akuntansi, Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Realisasi Semesteran APBN.
	KU.07	Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumen penyelesaian kerugian negara meliputi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
4	KP	KEPEGAWAIAN	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KP.01	Penyusunan Formasi Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan formasi pegawai mulai dari Usulan kebutuhan pegawai dari Unit Kerja, Usulan Permintaan formasi kepada Menpan RB dan BKN, Persetujuan Formasi dari Menpan dan BKN, Penetapan Formasi dan Penetapan Formasi Khusus.
	KP.02	Pengadaan Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan pegawai mulai dari penerimaan pegawai, Masa Percobaan PNS/ASN, pengangkatan baik Aparatur Sipil Negara pada Kementeriann, Pengadaan PPPK, Pengangkatan PPPK dan Pegawai Setempat pada Perwakilan, mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes sampai dengan pengumuman penerimaan, pemeriksaan kesehatan, prajabatan sampai dengan penempatan pegawai di unit-unit kerja, Seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama, Madya dan Utama serta lamaran pegawai yang tidak diterima, pegawai setempat (<i>local staff</i>).
	KP.03	Pembinaan Karir Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi yang terkait pengembangan karir, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan sistem merit yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Prestasi Kerja (DUPAK/DUPNK), Pengaturan Kode Etik Pegawai, Hukuman Disiplin Pegawai, Pakta Integritas Pegawai, Penghargaan dan Tanda Jasa, Assesment/Profiling, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KP.04	Pembinaan Jabatan Fungsional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan rumusan kebijakan teknis dan standarisasi, pelaksanaan analisis kompetensi dan kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan fungsional yang dibina Kementerian, penilaian kompetensi dan sertifikasi jabatan, penilaian dan penetapan angka kredit, penyiapan, perencanaan dan pertimbangan pengangkatan, kenaikan jenjang, dan alih jabatan, pemindahan, pemberhentian/pemberhentian sementara ke dalam jabatan fungsional, layanan informasi, bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi jabatan serta pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi organisasi profesi jabatan fungsional.
	KP.05	Mutasi Pegawai	
	KP.05.01	Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kenaikan pangkat/golongan reguler, pilihan, dan istimewa mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.02	Kenaikan Gaji Berkala	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kenaikan gaji berkala mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.03	Penyesuaian Masa Kerja	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian masa kerja mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.04	Penyesuaian Tunjangan Keluarga	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.05	Mutasi Keluarga	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian mutasi keluarga meliputi cacah jiwa perkawinan, kelahiran, perceraian dan kematian mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KP.05.06	Penyesuaian Jabatan/Perubahan Pegawai Kelas Jabatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian kelas jabatan/perubahan jabatan pegawai mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.07	Rotasi Kerja	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian rotasi kerja mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.08	Alih Tugas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian alih tugas mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.09	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
	KP.06	Perselisihan/Sengketa Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa pegawai mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.07	Administrasi Pegawai	
	KP.07.01	Data/Keterangan Pegawai dan Presensi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data/keterangan pegawai dan presensi.
	KP.07.02	Kartu Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.
	KP.07.03	Kartu Isteri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kartu isteri (KARIS)/kartu suami (KARSU).
	KP.07.04	Kartu Taspen	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kartu taspen.
	KP.07.05	Kartu Jaminan Kesehatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kartu jaminan kesehatan.
	KP.07.06	Cuti Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan cuti meliputi cuti tahunan, alasan penting, besar, sakit, bersalin dan cuti di luar tanggungan negara.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KP.08	Kesejahteraan Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan layanan pemeliharaan kesejahteraan pegawai, asuransi pegawai, tabungan perumahan, bantuan sosial, pakaian dinas, pegawai meninggal karena dinas, pemberian tali kasih, layanan olahraga dan rekreasi, beasiswa pendidikan anak di luar negeri.
	KP.09	Pemberhentian Jabatan	
	KP.09.01	Dengan Hormat	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai meliputi atas permintaan sendiri, sudah mencapai usia pensiun, dan tidak atas permintaan sendiri (meninggal dunia) mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK pemberhentian termasuk didalamnya pensiun duda/janda/anak.
	KP.09.02	Tidak Dengan Hormat	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses pemberhentian pegawai dengan tidak hormat.
	KP.10	Pengelolaan Organisasi Non Kedinasan	
	KP.10.01	KORPRI	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan KORPRI.
	KP.10.02	Dharma Wanita	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Dharma Wanita.
	KP.10.03	Koperasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Koperasi.
	KP.10.04	Yayasan Upakara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan Upakara.
	KP.10.05	Organisasi Non Kedinasan lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi non kedinasan lainnya.
	KP.11	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KP.11.01	Tingkat Madya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan seleksi terbuka jabatan tinggi tingkat madya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
	KP.11.02	Tingkat Pratama	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan seleksi terbuka jabatan tinggi tingkat pratama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
	KP.12	Pengelolaan Personal File	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan personal file mulai dari Surat Keputusan (SK) CPNS, pengangkatan pegawai sampai dengan pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Luar Negeri.
5	PL	PERLENGKAPAN	
	PL. 01	Rencana Pengadaan Barang	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan belanja modal dan barang serta analisis kebutuhan unit kerja dan kementerian yang meliputi peralatan fasilitas perkantoran, pengolahan data dan komunikasi, kendaraan dinas, instalasi/jaringan, tanah, bangunan, peralatan mesin dan listrik serta Aset Tak Berwujud (ATB).
	PL.02	Penawaran Barang dan Jasa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penawaran harga barang dan jasa termasuk data perusahaan.
	PL.03	Pengadaan Barang dan Jasa	
	PL.03.01	Telaahan pelaksanaan lelang/ pemilikan/penunjukan langsung	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan telaahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kementerian dan Perwakilan.
	PL.03.02	Penyiapan Dokumen Lelang	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan dokumen lelang pengadaan barang dan jasa meliputi TOR, Rencana Anggaran Belanja (RAB), Harga Perkiraan Sementara

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
			(HPS), spesifikasi barang dan jasa, desain dan gambar barang dan jasa.
	PL.03.03	Penunjukan Langsung	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan sistem penunjukan langsung mulai dari proses penawaran harga, penunjukan langsung, kontrak kerja sampai dengan serah terima barang.
	PL.04	Pengadaan Jasa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan jasa mulai dari proses penawaran harga, penunjukan langsung, kontrak kerja sampai dengan serah terima penyelesaian pekerjaan.
	PL.05	Penyimpanan dan Distribusi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bukti penyimpanan barang dan pendistribusian barang inventaris perlengkapan kantor dan barang habis pakai meliputi bukti barang masuk, bukti barang keluar, surat permintaan barang dari unit kerja, surat jalan pendistribusian inventaris perlengkapan kantor dan barang habis pakai sampai dengan berita acara serah terima barang ke unit kerja/pengguna barang.
	PL.06	Penggunaan Fasilitas Kantor	
	PL.06.01	Perlengkapan Kantor	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penggunaan perlengkapan kantor meliputi formulir peminjaman, permohonan peminjaman, rekap penggunaan perlengkapan kantor.
	PL.06.02	Kendaraan Dinas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penggunaan kendaraan dinas meliputi formulir peminjaman, permohonan peminjaman, rekap penggunaan.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PL.06.03	Ruangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penggunaan ruangan meliputi formulir peminjaman, permohonan peminjaman, rekap penggunaan.
	PL.07	Pengelolaan Dokumentasi dan Penatausahaan Aset Tanah dan Bangunan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi dan penatausahaan tanah dan bangunan, meliputi berkas peminjaman tanah dan bangunan, pengurusan sertifikat tanah negara dan berkas sengketa tanah negara.
	PL.08	Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Kementerian	
	PL.08.01	Personal	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Pengaturan jadwal piket/pengamanan penyiapan pengamanan fisik terhadap pimpinan, personal, dan tamu di lingkungan Kementerian.
	PL.08.02	Lingkungan Kantor	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan pengamanan fisik terhadap penanganan kegiatan demonstrasi, instalasi penting Kementerian termasuk peralatan, dokumen dan lingkungan.
	PL.09	Pengelolaan Barang Milik Negara	
	PL.09.01	Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP) barang milik negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
	PL.09.02	Pengelolaan Data Barang Milik Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan data barang milik negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan meliputi daftar barang kuasa pengguna, Kartu Identitas Barang (KIB) dan Daftar Barang Ruangan (DBR), pelaksanaan sampai dengan hasil inventarisasi BMN.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PL.09.03	Pengurusan Hibah Barang Milik Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan hibah barang milik negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
	PL.09.04	Penghapusan Barang Milik Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
	PL.09.05	Pelaporan Barang Milik Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan barang milik negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan, meliputi laporan kondisi barang, berita acara rekonsiliasi eksternal dan internal, laporan persediaan habis pakai dan laporan persediaan tidak habis pakai.
	PL.09.06	Inventarisasi BMN	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pendataan Barang Milik Negara (BMN).
	PL.09.07	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan bimtek pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
	PL.10	Pemeliharaan	
	PL.10.01	Gedung dan Rumah Dinas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemeliharaan gedung dan rumah dinas sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan.
	PL.10.02	Peralatan Kantor	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan kantor sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan.
	PL.10.03	Kendaraan Dinas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas dan pengangkutan pegawai Kementerian sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PL.10.04	Peralatan Mesin dan Listrik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan mesin dan listrik sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan.
	PL.10.05	Urusan dalam Perkantoran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan urusan dalam mulai dari pemeliharaan aset, pemeliharaan sarana prasarana fisik, pembayaran telepon, air, listrik, rumah dinas gedung kantor dan pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman.
	PL.11	Layanan Pengadaan	
	PL.11.01	Layanan Lelang Konstruksi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan pelaksanaan layanan lelang konstruksi dari proses pelaksanaan, evaluasi sampai pelaporan hasil lelang dan penyelesaian sanggahan.
	PL.11.02	Layanan Lelang Barang dan Seleksi Konsultan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan pelaksanaan layanan lelang barang dan seleksi konsultan dari proses pelaksanaan, evaluasi sampai pelaporan hasil lelang dan penyelesaian sanggahan.
	PL.11.03	Layanan Lelang Barang Jasa Lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan pelaksanaan layanan lelang barang jasa lainnya dari proses pelaksanaan, evaluasi, pelaporan hasil lelang dan penyelesaian sanggahan.
	PL.11.04	Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Jasa Pemerintah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia terkait kompetensi di bidang pengadaan jasa pemerintah.
6	HM.	KEHUMASAN	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	HM.01	Dukungan Hubungan Antar Lembaga	
	HM.01.01	Hubungan dengan Instansi Pusat, Lembaga/Pemerintah Daerah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi terkait urusan hubungan antar kementerian/lembaga, instansi pusat/lembaga/pemerintah daerah, pemberian dukungan penerjemah dan penerjemahan, serta pengelolaan bahan pemantauan arahan pimpinan dan isu prioritas.
	HM.01.02	Hubungan dengan Organisasi Nasional/Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi terkait urusan hubungan antar organisasi nasional dan internasional, pengelolaan bahan pemantauan arahan pimpinan dan isu prioritas.
	HM.01.03	Hubungan dengan Perusahaan (BUMN/BUMD/Swasta)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi terkait urusan hubungan dengan perusahaan (BUMN/BUMD/Swasta), pengelolaan bahan pemantauan arahan pimpinan dan isu prioritas.
	HM.01.04	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi terkait urusan hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, pengelolaan bahan pemantauan arahan pimpinan dan isu prioritas.
	HM.01.05	Kegiatan Forum Kehumasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi terkait urusan hubungan dengan forum kehumasan, pengelolaan bahan pemantauan arahan pimpinan dan isu prioritas.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	HM.01.06	Hubungan dengan Media Massa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, penghimpunan materi, pemantauan, analisis media dan perkembangan opini publik, pemberian dukungan diplomasi digital, pemberian dukungan substansi dan teknis kepada Menteri dan Wakil Menteri serta Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan sebagai Juru Bicara Kementerian dalam pelaksanaan keterangan pers, siaran pers, wawancara dan hubungan kerja dengan media.
	HM.02	Penghimpunan Dukungan Substansi Program Dalam Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi untuk menghimpun informasi dan bahan masukan mengenai substansi isu tematik dalam negeri di bidang politik, hukum dan keamanan serta hak asasi manusia, di bidang ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup, di bidang sosial budaya guna mendukung kegiatan Menteri dan Wakil Menteri.
	HM.03	Penghimpunan Dukungan Substansi Program Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi untuk menghimpun informasi dan bahan masukan mengenai substansi isu tematik luar negeri di bidang politik, hukum dan keamanan serta hak asasi manusia, di bidang ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup, di bidang sosial budaya, hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, kawasan Amerika Eropa dan organisasi intrakawasan dan hubungan antarnegara anggota ASEAN guna mendukung kegiatan Menteri dan Wakil Menteri.
	HM.04	Keprotokolan	
	HM.04.01	Penyelenggaraan acara kedinasan (pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara kedinasan meliputi: pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	HM.04.02	Penyelenggaraan Kegiatan Menteri dan Wakil Menteri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi pelaksanaan urusan kesekretariatan, penyiapan koordinasi bahan substansi, pemberian dukungan penerjemah dan penerjemahan untuk kegiatan Menteri dan Wakil Menteri serta pada pertemuan tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dan tingkat Menteri, pelaksanaan pemantauan arahan pimpinan dan isu prioritas
	HM.04.03	Kunjungan Dinas dalam dan luar negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri Menteri dan Wakil Menteri.
	HM.05	Dengar Pendapat/Hearing DPR	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan kegiatan dengar pendapat/ <i>hearing</i> dengan DPR.
	HM.06	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perseorangan yang memiliki jasa atau prestasi.
	HM.07	Pemberian Ucapan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan belasungkawa dan ucapan permohonan maaf.
7	HK	HUKUM	
	HK.01	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan penyiapan koordinasi, penelaahan, perumusan, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dari awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan di undangkan, meliputi Peraturan Menteri Luar Negeri, Keputusan/Ketetapan Menteri Luar Negeri, Instruksi/Surat Edaran Menteri Luar Negeri, Keputusan/Ketetapan Pejabat Eselon I, dan Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
			Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat institusional/instansional/nasional/regional.
	HK.02	Pemberian Pertimbangan Hukum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi pemberian pertimbangan hukum naskah dinas pengaturan dan penetapan dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan serta penyusunan perjanjian antarkementerian/lembaga dan/atau nonkementerian/lembaga.
	HK.03	Pelayanan Advokasi Hukum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan/ konsultasi hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan agama di lingkungan Kementerian dan Perwakilan terkait aspek perlengkapan dan keuangan, serta pendampingan kepada pejabat, pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, serta penyusunan bahan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk penyelesaian kasus yang membutuhkan bantuan pihak eksternal.
	HK.04	Kasus/Sengketa Hukum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, analisis kasus/sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase meliputi proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, pembelaan dan bantuan hukum serta telaah hukum dan opini hukum.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	HK.05	Perizinan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi terkait naskah dinas perizinan dalam aspek kepegawaian.
	HK.06	Pengkajian Produk Hukum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi layanan hukum, pengkajian produk hukum serta dukungan advokasi hukum, aspek kepegawaian, organisasi, keuangan dan perlengkapan, meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan peraturan/kebijakan negara sahabat.
	HK.07	Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi, dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang terkait dengan Kementerian dan Perwakilan.
8	DL	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	DL.01	Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum, program, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
	DL.02	Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan modul-modul diklat, analisis kebutuhan materi/bahan ajar pendidikan dan pelatihan.
	DL.03	Panduan Fasilitator	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan fasilitas pendukung pembelajaran.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	DL.04	Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan usulan dan rekomendasi program dan kegiatan serta tenaga pengajar, widyaiswara, pengelola dan kerja sama pendidikan dan pelatihan.
	DL.05	Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan rapat koordinasi kebijakan penyelenggaraan, pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan
	DL.06	Penyusunan Rencana Tahunan Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana tahunan pendidikan dan pelatihan dan pembinaan dan pengawasan Sekolah Indonesia di luar negeri.
	DL.07	Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan peninjauan, pelaksanaan, pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta, organisasi internasional serta lembaga nasional dan internasional lainnya, pemantauan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan non gelar, pemantauan pelaksanaan urusan tugas belajar, dan pembinaan serta pengawasan Sekolah Indonesia di luar negeri.
	DL.08	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mulai dari surat pemanggilan peserta diklat, pembentukan SK Tim sampai dengan penyampaian Sertifikat/STTPL kepada peserta diklat.
	DL.09	Jenis penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	DL.09.01	Diklat Prajabatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kurikulum, program, dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan CPNS untuk menjadi ASN/PNS.
	DL.09.02	Diklat Diplomatik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kurikulum, program, dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kompetensi jabatan fungsional diplomat di bidang diplomasi dan hubungan politik luar negeri.
	DL.09.03	Diklat Nondiplomatik dan Teknis	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kurikulum, program, dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kompetensi jabatan fungsional nondiplomatik dan teknis.
	DL.09.04	Diklat Struktural	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kurikulum, program, dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kompetensi pejabat struktural.
	DL.09.05	Diklat Fungsional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kurikulum, program, dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kompetensi pejabat fungsional.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	DL.10	Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, instrumen dan fasilitas yang menjadi penjamin mutu serta akreditasi dalam rangka penilaian pengakuan peringkat kelayakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
	DL.11	Sertifikasi Sumber Daya Manusia	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta penerbitan Sertifikat/STTP Pendidikan dan Pelatihan.
	DL.12	Penyusunan Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan sistem informasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
	DL.13	Pelaksanaan Registrasi Sertifikat/STTP Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan registrasi sertifikat/STTP Peserta.
	DL.14	Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan diklat meliputi: kurikulum diklat, modul dan bahan ajar, data peserta diklat, tenaga pengajar dan widyaiswara, penyelenggaraan diklat dan sertifikat pendidikan dan pelatihan.
	DL.15	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	DL.16	Pemantauan dan Evaluasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi program dan kegiatan, pengembangan kelembagaan, penjaminan mutu dan akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan, pengelolaan fasilitas pendukung pembelajaran, pembinaan dan pengawasan Sekolah Indonesia di luar negeri serta pelaksanaan urusan tugas belajar.
9	TK	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
	TK.01	Penyusunan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, data digital diplomatik, Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Persandian Diplomatik yang meliputi Standar, Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Prosedur TIK.
	TK.02	Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
	TK.02.01	Rencana Strategi/ <i>Master Plan</i> Pembangunan SPBE	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis/ <i>Master Plan</i> .
	TK.02.02	Arsitektur dan Implementasi terkait SPBE	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Persandian Diplomatik.
	TK.02.03	Rencana Induk/Peta Rencana SPBE dan Persandian Diplomatik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Induk/Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Persandian Diplomatik.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	TK.03	Pembinaan Kepatuhan terhadap Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kepatuhan terhadap kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta standar/prosedur bidang: TIK data digital diplomatik, sistem komunikasi terpadu, keamanan informasi, dan persandian diplomatik.
	TK.04	Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
	TK.04.01	Pemutakhiran Data	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi digital diplomatik, Pemutakhiran Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), manajemen keamanan informasi dan persandian diplomatik.
	TK.04.02	Pengelolaan <i>Server</i> , Data dan Informasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan server, Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
	TK.05	Layanan Pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	
	TK.05.01	Layanan dan Dukungan Teknis Infrastruktur TIK	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi pemberian layanan dan dukungan teknis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
	TK.05.02	<i>Helpdesk</i> TIK/Penanganan keluhan Aplikasi Sistem Informasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi <i>helpdesk</i> di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	TK.05.03	Pengelolaan Pustaka Infrastruktur TIK	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi pengelolaan pustaka infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
	TK.06	Monitoring dan Evaluasi	
	TK.06.01	Penyelenggaraan terkait SPBE dan Persandian Diplomatik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan capaian tingkat layanan (<i>Service Level Agreement</i>) TIK; Laporan Penerapan manajemen resiko SPBE dan Persandian Diplomatik; Laporan Evaluasi Layanan TIK; Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian RISTIK, Pembinaan SDM, dan Proses TIK; Laporan Capaian Penerapan Rencana Induk/Peta Rencana SPBE; Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi.
	TK.06.02	Pelaksanaan TIK	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TIK.
10	AR	KEARSIPAN	
	AR.01	Penyusunan Instrumen Kearsipan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan instrumen kearsipan meliputi tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip, serta petunjuk pelaksanaan dan SOP kearsipan.
	AR.02	Pengendalian dan Pengurusan Surat	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penanganan dan pengurusan naskah dinas masuk/keluar yang meliputi: penerimaan, pencatatan, pengendalian dan pendistribusian dengan menggunakan sarana berupa kartu kendali, lembar pengantar, lembar disposisi, buku agenda dan buku ekspedisi.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	AR.03	Penyimpanan dan Pemeliharaan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberkasan, penataan dan penyimpanan arsip serta alih media arsip, dan layanan peminjaman arsip.
	AR.04	Penyusutan Arsip	
	AR.04.01	Pemindahan Arsip	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke Sentral Arsip Inaktif/ <i>Records Center</i> mulai dari penilaian arsip, pembuatan Daftar Arsip yang Dipindahkan, verifikasi arsip yang dipindahkan, sampai dengan Berita Acara Pemindahan Arsip.
	AR.04.02	Pemusnahan Arsip	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemusnahan arsip di Sentral Arsip Inaktif/ <i>Records Center</i> mulai dari penilaian arsip, pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah, verifikasi arsip yang akan dimusnahkan, penyusunan Daftar Arsip Musnah, persetujuan pemusnahan arsip, sampai dengan Berita Acara Pemusnahan Arsip.
	AR.04.03	Penyerahan Arsip Statis	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia dari penilaian arsip, pembuatan Daftar Arsip Usul Serah, verifikasi arsip yang akan diserahkan, penyusunan Daftar Arsip Serah, persetujuan penyerahan arsip sampai dengan Berita Acara Penyerahan Arsip.
	AR.05	Layanan Administrasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pencalonan Kepala Perwakilan Republik Indonesia, perizinan, surat-surat kepercayaan, pengangkatan dan pemberhentian serta layanan administrasi lainnya bagi Kepala Perwakilan, Konsul Kehormatan, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Pejabat Khusus, serta hal-hal yang terkait dengan pengelolaan kantong diplomatik.
	AR.06	Pembinaan Kearsipan	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	AR.06.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan Arsiparis/pengelola arsip meliputi bimbingan teknis kearsipan, supervisi di bidang kearsipan dan penilaian kinerja Arsiparis/pengelola arsip yang berprestasi.
	AR.06.02	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kearsipan.
	AR.07	Pengawasan Kearsipan	
	AR.07.01	Pengawasan Internal	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan kearsipan internal yang meliputi perencanaan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT), pelaksanaan audit kearsipan, supervisi, Ringkasan Hasil Audit Sementara (RHAS) dan pelaporan (Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)).
	AR.07.02	Pengawasan Eksternal	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan kearsipan eksternal yang meliputi perencanaan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT), pelaksanaan audit kearsipan, supervisi, Ringkasan Hasil Audit Sementara (RHAS) dan pelaporan (Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)).
11	PS.	KEPUSTAKAAN	
	PS.01	Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka	
	PS.01.01	Penerimaan Koleksi bahan Pustaka	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan koleksi sampai penempatan di rak atau tempat yang telah disediakan.
	PS.01.02	Pengelolaan Koleksi bahan pustaka	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana operasional, registrasi bahan pustaka, pengecapan atau stempel perpustakaan, menentukan sistem klasifikasi dan kelengkapan lainnya berupa label, kartu, slip dan sampul buku.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PS.02	Pengadaan Bahan Pustaka	
	PS.02.01	Pencatatan Buku Induk Koleksi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan pengadaan bahan pustaka dengan buku induk koleksi.
	PS.02.02	Pencatatan Daftar pada Buku Koleksi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan pengadaan bahan pustaka dengan daftar buku induk koleksi.
	PS.02.03	Pemesanan Buku	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemesanan pengadaan bahan pustaka.
	PS.02.04	Permintaan Buku	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan permintaan pengadaan bahan pustaka.
	PS.02.05	Penerimaan Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah Deposit, Hibah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan koleksi bahan pustaka melalui proses pembelian, hadiah deposit maupun hibah.
	PS.02.06	Pengiriman Bahan Pustaka Surplus	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman koleksi bahan pustaka yang surplus.
	PS.02.07	Pengkatalogan (Proses Katalogisasi)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses pengkatalogisian bahan pustaka.
	PS.02.08	Perancangan Jajaran Kartu Utama	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perancangan pada sistem komputer dalam mengolah, menyimpan dan menggunakan koleksi dalam rangka pembuatan jajaran kartu utama.
	PS.02.09	Penambahan Buku Koleksi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penambahan koleksi bahan pustaka.
	PS.02.10	Perancangan Kartu, Slip Buku berdasarkan Subjek dan Pengarang	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perancangan kartu, slip buku koleksi bahan pustaka berdasarkan subjek dan pengarang.
	PS.03	Layanan Perpustakaan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan layanan perpustakaan meliputi peminjaman dan penggunaan bahan Pustaka.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
12.	PW	PENGAWASAN	
	PW.01	Pedoman Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan himpunan produk hukum, perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Pengawasan Intern dan pengawasan lainnya.
	PW.02	Rencana Program Pengawasan	
	PW.02.01	Rencana Strategis Pengawasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan strategis kebijakan dan pendanaan serta program kegiatan pengawasan.
	PW.02.02	Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
	PW.02.03	Rencana Kinerja Pengawasan, Penetapan Kinerja Pengawasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pengawasan.
	PW.03	Audit	
	PW.03.01	Audit keuangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas organisasi/unit kerja, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
	PW.03.02	Audit Kinerja	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdiri atas aspek kepatuhan, kehematan, efisiensi dan efektifitas organisasi/unit kerja, meliputi perencanaan dan tindak lanjut hasil audit.
	PW.03.03	Audit Kebijakan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PW.03.04	<i>Probity</i> Audit	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan <i>probity</i> audit meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
	PW.03.05	Audit Berbasis Resiko	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit berbasis resiko meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
	PW.03.06	Audit dengan Tujuan Tertentu	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit tujuan tertentu, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
	PW.04	Reviu	
	PW.04.01	Reviu Laporan Keuangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reviu laporan keuangan baik semesteran dan tahunan meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
	PW.04.02	Reviu RKA-KL	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reviu RKA-KL meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
	PW.04.03	Reviu Lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reviu laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), BMN, Revisi Anggaran, Aspek Keuangan Tertentu, Aspek Kinerja Tertentu, Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dan Hasil Kajian Pengawasan tertentu baik semesteran dan tahunan meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
	PW.05	Evaluasi	
	PW.05.01	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
			meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
	PW.05.02	Evaluasi Reformasi dan Birokrasi (RB)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pelaksanaan RB dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian.
	PW.05.03	Evaluasi Program Lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi program meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
	PW.06	Pemantauan/Monitoring	
	PW.06.01	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan kegiatan/program unit kerja meliputi perencanaan hingga pelaporan.
	PW.06.02	Pemantauan Lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan lainnya selain pemantauan kegiatan/program unit kerja meliputi perencanaan hingga pelaporan.
	PW.07	Pengaduan Masyarakat	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dan <i>Whistleblowing System</i> .
	PW.08	Laporan Hasil Pengawasan	
	PW.08.01	Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik yang disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK maupun BPKP serta tanggapan atas Laporan Hasil Pengawasan BPK mencakup Tindak Lanjut atas Laporan.
	PW.09	Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PW.09.01	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK meliputi data dukung tindak lanjut, pemantauan sampai dengan pelaporan.
	PW.09.02	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPKP	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPKP meliputi data dukung tindak lanjut, pemantauan sampai dengan pelaporan.
	PW.09.03	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan LHP Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti meliputi surat tugas sampai dengan pelaporan.
	PW.09.04	Pemutakhiran Data Kasus	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan input data kasus, pemutakhiran data kasus sampai dengan pelaporan tindak lanjut.
	PW.10	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
	PW.10.01	Pengendalian Gratifikasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi sampai dengan pelaporan.
	PW.10.02	Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Zona Integritas (WBK dan WBBM) sampai dengan pelaporan.
	PW.10.03	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian SPIP.
	PW.10.04	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Arsip atau rekaman kegiatan, peristiwa dan surat yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKASN.
	PW.11	Kegiatan Pengawasan Lainnya	
	PW.11.01	Konsultasi dan Asistensi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembimbingan dan konsultasi serta pendampingan dan supervisi

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
			atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/program kerja/anggaran.
	PW.11.02	Diseminasi di bidang Pengawasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemberian atau pendistribusian informasi, sosialisasi terkait kebijakan pengawasan.
	PW.11.03	Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas)/Rapat Koordinasi Pengawas (Rakorwas)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Rakerwas/Rakorwas yang meliputi surat penugasan, surat undangan, narasumber sampai dengan pelaporan.
	PW.11.04	Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pemberian Keterangan Ahli, dan kegiatan lainnya terkait koordinasi dengan aparat hukum.
	PW.11.05	Sistem Informasi/Aplikasi Pengawasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bentuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi/aplikasi pengawasan, pengelolaan <i>data base</i> pengawasan.
	PW.11.06	Kapabilitas APIP (<i>Internal Audit Capability Model - IACM</i>)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek berupa peran dan layanan audit intern, pengelolaan SDM, praktik profesional, manajemen kinerja dan akuntabilitas, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola.

B. FUNGSI SUBSTANTIF

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK	HUBUNGAN BILATERAL, INTRAKAWASAN DAN ANTARKAWASAN	
BK.01	Perumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumusan kebijakan, standarisasi teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), pedoman, petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan Bilateral, Intrakawasan dan Antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.
BK .02	Perundingan Kerja Sama Bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	
BK.02.01	Kawasan Asia Tenggara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Asia Tenggara meliputi negara: Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.02.02	Kawasan Asia Timur	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Asia Timur meliputi negara: Republik Rakyat Tiongkok (termasuk teritori Hong Kong SAR dan Macau SAR), Jepang, Republik Korea, Republik Demokratik Rakyat Korea dan Mongolia.
BK.02.03	Kawasan Pasifik dan Oseania	<p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral dan regional di kawasan Pasifik dan Oseania meliputi:</p> <p>a. Negara dan teritori: Australia, Kepulauan Cook, Kaledonia Baru, Kiribati, Federasi Mikronesia, Fiji, Kepulauan Marshall, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Polinesia Perancis, Samoa, Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.</p> <p>b. Forum Regional: <i>African, Carribean and Pacific Group of States (ACP)</i>, <i>Melanesian Spearhead Group (MSG)</i>, <i>Pacific Islands Forum (PIF)</i>, <i>Pacific Islands Development Forum (PIDF)</i> dan <i>Southwest Pacific Dialogue (SwPD)</i>.</p>
BK.02.04	Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Asia Selatan dan Tengah meliputi negara: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan Turkmenistan, dan Uzbekistan.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.02.05	Kawasan Timur Tengah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Timur Tengah meliputi negara: Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Kuwait, Libya, Lebanon, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Sudan, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Yaman dan Yordania.
BK.02.06	Kawasan Afrika	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Afrika Sub Sahara meliputi negara: Nigeria, Benin, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kamerun, Republik Kongo, Liberia, Niger, Sao Tome and Principe, Togo, Chad, Republik Afrika Tengah, Guinea-Bissau, Mali, Pantai Gading, Sierra Leone, Ethiopia, Rwanda, Burundi, Djibouti, Tanzania, Eritrea, Kenya, Mozambik, Malawi, Uni Komoro, Madagaskar, Afrika Selatan, Lesotho, Eswatini, Botswana, Namibia, Angola, Zambia, dan Zimbabwe.
BK .03	Perundingan Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.03.01	Kawasan Asia Pasifik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi, Kerjasama dan perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan kerjasama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik, meliputi kerangka kerjasama dengan: <i>Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asia-Pacific Parliamentarians on Environment and Development (APPCED), IORA, Asia Middle East Dialogue (AMED), Gulf Cooperation Council (GCC), Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA), Asia Cooperation Dialogue (ACD), Heart of Borneo (HoB), Shanghai Cooperation Organization (SCO), Boao Forum for Asia, South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Central Asia Cooperation Organization (CACO), Economic Cooperation Organization (ECO), Initiative for Development in East Asia (IDEA), Australia-Indonesia Development Assistance (AIDA), Joint Policy Committee Indonesia-Northern Territory</i> dan Forum kerja sama lainnya di kawasan Asia Pasifik.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.03.02	Kawasan Afrika	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi, Kerjasama dan perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan kerjasama intrakawasan dan antarkawasan Afrika meliputi kerangka kerjasama dengan: <i>New Asian-African Strategic Partnerships</i> (NAASP), Uni Afrika, <i>Common Market for Eastern and Southern Africa</i> (COMESA), <i>Economic Community of West African States</i> (ECOWAS), <i>Southern African Development Community</i> (SADC), <i>East Africa Community</i> (EAC), <i>Southern African Customs Union</i> (SACU), <i>Economic Community of Central African States</i> (ECCAS), <i>Central African Economic and Monetary Community</i> (CEMAC), <i>West African Economic and Monetary Union</i> , <i>Intergovernmental Authority on Development</i> , Liga Arab, <i>Asia Middle East Dialogue</i> (AMED), <i>Gulf Cooperation Council</i> (GCC), <i>Arab Maghreb Union</i> , dan Forum kerja sama lainnya di kawasan Afrika.
BK .04	Perundingan Kerja Sama Bilateral di kawasan Amerika dan Eropa	
BK.04.01	Kawasan Amerika	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Amerika, meliputi negara: Amerika Serikat, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kanada, Kosta Rika, Meksiko, Nikaragua, Panama, Antigua and Barbuda, Argentina, Banamas, Barbados, Bolivia, Brazil, Chile, Dominika Persemakmuran, Ekuador, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Kolombia, Kuba, Paraguay, Peru, Republik Dominika, St. Kitts and Navis, St. Lucia, St. Vincent and The Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, dan Venezuela.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.04.02	Kawasan Eropa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Eropa, meliputi negara: Andorra, Austria, Belanda, Belgia, Ceko, Hungaria, Inggris, Irlandia, Italia, Luksemburg, Malta, Monako, Polandia, Portugal, Perancis, San Marino, Spanyol, Siprus, Slovenia, Slovakia, Vatikan, Yunani, dan Albania, Armenia, Belarus Bulgaria, Bosnia dan Herzegovina, Denmark, Estonia, Finlandia, Georgia, Islandia, Jerman, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Montenegro, Makedonia Utara, Moldova, Norwegia, Rumania, Rusia, Serbia, Swedia, Swiss, Turki, dan Ukraina.
BK .05	Perundingan Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa	
BK.05.01	Kawasan Amerika	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi, Kerjasama dan Perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan kerjasama intrakawasan dan antarkawasan Amerika, meliputi kerangka kerja sama dengan: Energy Charter, FEALAC, Pacific Alliance, ALBA, UNASUR, MERCOSUR, OAS, CARICOM, SICA, ALADI, PARLACEN, CELAC, NAFTA, MIKTA, Community of Democracies, OECD, Arctic Council, Antarctic Treaty System, NATO, GUAM, dan Organisasi Kerja sama lainnya di kawasan Amerika.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.05.02	Kawasan Eropa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi, Kerjasama dan Perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan kerjasama intrakawasan dan antarkawasan Eropa, meliputi kerangka kerja sama dengan: Uni Eropa, ASEM, Energy Charter, CERN, Energy Community, Eureka, European Science and Technology, COST, EFTA, Community of Democracies, OECD, Council of Europe, AER, NORDIC Council, Council of Baltic States, CIS, Commonwealth of Nations, CPLP, OIF, Arctic Council, Antarctic Treaty System, CSTO, OSCE, AITIC, Eurasian Economic Union, Union for the Mediterranean dan Organisasi Kerja sama lainnya di kawasan Eropa.
BK .06	Promosi Terpadu, Misi Bisnis, Misi Budaya dan Kegiatan sejenis lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan promosi terpadu, misi bisnis, misi budaya dan kegiatan sejenis lainnya di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.
BK .07	Isu dan Laporan Khusus	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan isu dan laporan khusus di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.
BK.08	Pemberian Panduan Substantif dan Fasilitasi Perundingan	
BK.08.01	Penyusunan Kertas Kerja	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kertas kerja dalam kerangka hubungan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.08.02	Diseminasi Hasil Perundingan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan analisis data, dan penyiapan bahan promosi serta bahan diseminasi informasi hasil perundingan dalam kerangka hubungan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.
BK.09	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup hubungan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.
KA	KERJA SAMA ASEAN	
KA.01.	Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.01.01	Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN	<p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama pilar politik keamanan ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN kerja sama dalam bidang kawasan netral, bebas dan damai (<i>Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN</i>), kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara (<i>South East Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEANWFZ</i>), kerja sama persahabatan/<i>Treaty of Aminty Cooperation (TAC)</i>, pertemuan Direktorat Jenderal ASEAN (<i>ASEAN Director General /ASEAN DGs</i>), CPR, analisis politik dan koordinasi <i>Senior Officials Meeting (SOM)</i>, <i>ASEAN Standing Committee (ASC)</i>, <i>Post Ministerial Conference (PMC)</i>, <i>ASEAN Ministerial Meetings (AMM)</i>, <i>Joint Consultative Meeting (JCM)</i> dan KTT ASEAN, Laut China Selatan, Penunjukan Dubes Asing untuk ASEAN, Keanggotaan Timor Leste di ASEAN, <i>ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework, Women, Peace and Security, ASEAN Outlook on the Indo Pacific, Development in Myanmar, Keketuaan ASEAN, ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)/ ASEAN Defence Senior Officials Meeting (ADSOM), ADMM-PLUS/ADSOM-PLUS, ASEAN Ministers Meeting on Transnational Crime (AMMTC)/ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime, ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matter , ASEAN Senior Official on Drugs Matter, ASEAN Maritime Forum (AMF), Expanded ASEAN Maritime Forum, ASEAN Regional Mine Action Centre, ASEAN Coasts Guards Forum.</i></p>

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.01.02	Kerja Sama Hukum dan Hak Azasi Manusia	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar politik Keamanan ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN kerja sama dalam bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan konsuler, <i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)</i> , <i>extradisi, privilege and immunity, mutual legal assistance</i> .
KA.01.03	Kerja Sama Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama pilar politik Keamanan ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN kerja sama dalam bidang <i>ASEAN Regional Forum (ARF)</i> , lembaga regional dan entitas ASEAN seperti <i>ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)</i> , <i>ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)</i> , <i>ARF Security Policy Conference (ASPC)</i> , serta forum, lembaga regional dan entitas ASEAN lainnya
KA.02	Kerja Sama Ekonomi ASEAN	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.02.01	Investasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Jasa Ekonomi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama pilar ekonomi ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN mengenai kerja sama dalam bidang ASEAN <i>Economic Minister (AEM)</i> , <i>Senior Economic Official Meetings (SEOM)</i> , <i>Initiative for ASEAN Integration (IAI)</i> , <i>ASEAN Single Window (ASW)</i> , perindustrian, investasi dan perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), <i>ASEAN Free Trade Area (AFTA)</i> , perdagangan bebas ASEAN dengan mitra, <i>Free Trade Agreement/Economic Partnership</i> dengan mitra eksternal ASEAN (RCEP), penyelesaian sengketa, perdagangan jasa, konstruksi, keuangan dan perbankan, kerja sama telekomunikasi dan digital, perhubungan dan telekomunikasi, konektivitas ASEAN, pariwisata, bea cukai, pembangunan.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.02.02	Komoditi dan Sumber Daya Alam	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama pilar ekonomi ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN mengenai kerja sama dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, perikanan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan mineral dan sumber daya alam.
KA.02.03	Kerja Sama Subkawasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN mengenai kerja sama dalam bidang Subkawasan Indonesia- Malaysia-Thailand <i>Growth Triangle</i> (IMT-GT), Subkawasan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines- East ASEAN <i>Growth Triangle</i> (BIMP-EAGA), dan Subkawasan ASEAN lainnya.
KA.03	Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.03.01	Kerja Sama Bidang Sosial	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN mengenai kerja sama dalam bidang perempuan dan anak, pemuda, olahraga, Yayasan ASEAN, Aparatur Sipil Negara, sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat dan tenaga kerja migran.
KA.03.02	Kerja Sama Bidang Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama pilar sosial budaya ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN mengenai kerja sama dalam bidang penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
KA.04	Kerja Sama Eksternal ASEAN	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.04.01	Kerja Sama Eksternal dengan Asia Timur	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal ASEAN di kawasan Asia Timur di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya meliputi kerja sama ASEAN dengan RRT, Jepang, Republik Korea (ROK), Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK), negara lainnya di Kawasan Asia Timur.
KA.04.02	Kerja Sama Eksternal dengan Asia Selatan, Afrika dan Pasifik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal ASEAN di kawasan Asia Selatan, Afrika, dan Pasifik, di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya meliputi kerja sama ASEAN dengan Australia, India, Selandia baru, Pakistan, Bangladesh, Fiji, Maroko, Mesir, Sri Lanka, negara lainnya di Kawasan Asia Selatan, Afrika dan Pasifik.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.04.03	Kerja Sama Eksternal dengan Amerika, Eropa dan Kawasan Lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal ASEAN di kawasan Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya, di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya meliputi kerja sama ASEAN dengan Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Rusia, Norwegia, Swiss, Jerman, Turki, Negara Lainnya di Kawasan Amerika, Eropa dan kawasan lainnya.
KA.04.04	Kerja Sama Eksternal dengan Organisasi Regional dan Organisasi Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya meliputi ASEAN <i>Plus Three</i> (APT), <i>East Asia Summit</i> (EAS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), <i>Economic Cooperation Organization</i> (ECO), <i>Gulf Cooperation Council</i> (GCC), <i>Mercado Comun del Sur/Common Market of the South</i> (MERCOSUR), <i>South Asia Association for Regional Cooperation</i> (SAARC), <i>Community of Latin American and Caribbean States</i> (CELAC), <i>Pacific Alliance</i> (PA) serta organisasi regional dan organisasi internasional lainnya.
TI	PENANGANAN ISU INTERNASIONAL	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.01	Pencalonan Indonesia pada Organisasi Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan mengenai pencalonan Indonesia maupun pencalonan negara lain dan posisi Indonesia berkaitan dengan berbagai pencalonan pada organisasi internasional.
TI.02	Peluang Kerja dan Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi lowongan jabatan dan urusan peluang pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Internasional.
TI.03	Kerja Sama Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	
TI.03.01	Keamanan Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama keamanan internasional dan perlucutan senjata meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu Keamanan Internasional meliputi: pencegahan dan penyelesaian konflik, konflik antar negara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, kelembagaan keamanan internasional, bina perdamaian pasca konflik (<i>post-conflict peace building</i>).
TI.03.02	Perlucutan Senjata	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama keamanan internasional dan perlucutan senjata meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu perlucutan senjata meliputi: misi-misi politik khusus, perlucutan senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia, senjata konvensional.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.03.03	Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama keamanan internasional dan perlucutan senjata meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai Penanggulangan kejahatan lintas negara, meliputi: perdagangan manusia, penyelundupan manusia, narkoba, bali proses, UNCAC, <i>wild life crime</i> , IACA, CCPCJ, UNODC.
TI.03.04	Penanggulangan Terorisme	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama keamanan internasional dan perlucutan senjata meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai Penanggulangan terorisme meliputi : penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas.
TI.03.05	Keamanan Siber	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama keamanan internasional dan perlucutan senjata meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai keamanan siber.
TI.04	Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.04.01	Hak-Hak Sipil dan Politik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hak asasi manusia dan kemanusiaan meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu hak-hak sipil meliputi: Pemajuan hak-hak sipil dan politik, perlindungan hak-hak sipil dan politik dan mekanisme hak-hak sipil dan politik.
TI.04.02	Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Pembangunan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hak asasi manusia dan kemanusiaan meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan pembangunan meliputi: pemajuan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan pembangunan, perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan pembangunan serta mekanisme hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan pembangunan.
TI.04.03	Hak-Hak Kelompok Rentan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hak asasi manusia dan kemanusiaan meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu hak-hak Kelompok rentan meliputi: hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.
TI.04.04	Kemanusiaan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hak asasi manusia dan kemanusiaan meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu kemanusiaan meliputi: humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan <i>Internality Displaced Persons</i> , dampak kemanusiaan konflik internal.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.05	Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup	
TI.05.01	Ekonomi dan Keuangan Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu ekonomi dan keuangan internasional meliputi: organisasi pembangunan ekonomi PBB, lembaga keuangan internasional, G-20, pembangunan ekonomi badan-badan regional PBB, administrasi, anggaran dan koordinasi.
TI.05.02	Pembangunan Berkelanjutan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pembangunan berkelanjutan meliputi: pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan dan kegiatan operasional PBB.
TI.05.03	Pembangunan Sektoral	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pembangunan sektoral meliputi: kerja sama teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama infrastruktur dan komunikasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.05.04	Lingkungan Hidup	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu lingkungan hidup meliputi: lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pendanaan global program lingkungan hidup.
TI.05.05	Kehutanan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu kehutanan.
TI.05.06	Kelautan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu kelautan.
TI.06	Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.06.01	Perdagangan Barang, Pengembangan Industri dan Investasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu perdagangan barang, pengembangan industri dan investasi yang meliputi: perdagangan barang non pertanian, kerja sama pengembangan industri, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi dan isu-isu baru, <i>World Trade Organization</i> , kerja sama pengembangan ekonomi kreatif, kerja sama pengembangan ekonomi digital.
TI.06.02	Perdagangan Jasa dan Fasilitas Perdagangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu perdagangan jasa dan fasilitas perdagangan yang meliputi: perdagangan jasa dan <i>e-commerce</i> , kerja sama perdagangan, akses <i>World Trade Organization</i> dan kajian perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, kelembagaan dan peningkatan kapasitas.
TI.06.03	Pertanian dan Komoditi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pertanian dan komoditi yang meliputi: pertanian, komoditi pangan dan perkebunan, komoditi kehutanan dan pertambangan, komoditi kelautan dan dana bersama komoditi.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.06.04	Standarisasi, Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu standarisasi, hak kekayaan intelektual dan penyelesaian sengketa yang meliputi: standarisasi barang dan jasa, penanganan sengketa dan pengamanan perdagangan, penanganan hambatan teknis perdagangan dan hak kekayaan intelektual.
TI.07	Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	
TI.07.01	Pembangunan Sosial, Badan-Badan Khusus PBB dan Isu-isu Terkini	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB) meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB dan isu-isu terkini yang meliputi: pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi dan tata pemerintahan, isu-isu sains dan teknologi.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.07.02	Sosial Budaya dan Lembaga Non Pemerintah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB) meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu sosial budaya dan lembaga non pemerintah yang meliputi: kesehatan global, pendidikan, kebudayaan dan kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antar negara dan organisasi internasional nonpemerintah.
TI.07.03	Organisasi Internasional Negara Berkembang	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB) meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu organisasi internasional negara berkembang yang meliputi: politik organisasi konferensi islam, ekonomi, sosial dan budaya organisasi konferensi islam, politik gerakan non blok, ekonomi, sosial dan budaya gerakan non blok.
TI.07.04	Kemitraan Selatan-Selatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB) meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu organisasi internasional negara berkembang yang meliputi: kelompok 77, kelompok 15, kelompok D-8, kerja sama selatan-selatan.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.08	Keanggotaan dan Kontribusi pada Organisasi Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi, kontribusi pencalonan dan dukungan keanggotaan, pelaksanaan pengkajian dan penetapan prioritas keanggotaan dan pembayaran kontribusi Indonesia serta pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional.
TI.09	Sidang Umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan perundingan dalam kerangka Sidang Umum PBB.
TI.10	Bencana Global	
TI.08.01	Bencana Alam	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kejadian dan penanggulangan bencana alam.
TI.08.02	Pandemi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyebaran dan penanggulangan wabah penyakit.
HI	HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	
HI.01	Perumusan Norma Hukum Nasional dan Perjanjian Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
HI.02	Pelaksanaan Perjanjian Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian pembuatan perjanjian bilateral, regional dan multilateral di bidang politik dan keamanan, kewilayahan dan kelautan, perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, lingkungan hidup, kerja sama teknik, sosial, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan serta hukum privat internasional, yang meliputi: pembuatan Surat Kuasa (<i>Full Powers</i>), piagam pengesahan, proses perundingan, dan ratifikasi/pengesahan perjanjian termasuk penyelesaian sengketa.
HI.03	Advokasi Hukum dan Perjanjian Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian internasional meliputi kegiatan bantuan teknis, hukum perdata internasional, perundingan penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa perjanjian internasional.
HI.04	Diseminasi, Publikasi Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan analisis data, kertas kerja dan laporan serta pengelolaan, pemantauan status dan penyiapan pelaksanaan sosialisasi serta publikasi naskah hukum dan perjanjian internasional.
HI.05	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional.
DM	INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
DM.01	Diplomasi Publik Bidang Politik dan Keamanan Luar Negeri	
DM.01.01	Bidang Politik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan diplomasi publik bidang politik.
DM.01.02	Bidang Keamanan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan diplomasi publik bidang keamanan.
DM.02	Diplomasi Publik Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
DM.02.01	Bidang Ekonomi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan diplomasi publik bidang ekonomi.
DM.02.02	Bidang Pembangunan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan diplomasi publik bidang pembangunan.
DM.03	Diplomasi Publik bidang Sosial dan Budaya	
DM.03.01	Bidang Sosial	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan diplomasi publik bidang sosial.
DM.03.02	Bidang Budaya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan diplomasi publik bidang budaya.
DM.04	Diplomasi Publik terhadap Isu Aktual dan Strategis	
DM.04.01	Strategis Kewilayahan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis diplomasi publik bidang strategis kewilayahan.
DM.04.02	Strategis Lokal	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis diplomasi publik bidang strategis lokal.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
DM.05	Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri	
DM.05.01	Ekonomi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik melalui pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri (<i>diaspora, friends of Indonesia</i>) dalam hal pendataan dan penggalangan ekonomi.
DM.05.02	Inovasi dan teknologi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik melalui pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri (<i>diaspora, friends of Indonesia</i>) dalam hal inovasi dan teknologi.
DM.05.03	Sosial Budaya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik melalui pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri (<i>diaspora, friends of Indonesia</i>) dalam hal sosial budaya.
DM.05.04	Pendidikan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik melalui pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri (<i>diaspora, friends of Indonesia</i>) dalam hal pendidikan.
DM.05.05	Filantropi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik melalui pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri (<i>diaspora, friends of Indonesia</i>) dalam hal filantropi.
DM.06	Penyelenggaraan Museum Konferensi Asia Afrika	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
DM.06.01	Publikasi dan Promosi Nilai-Nilai Konferensi Asia Afrika	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan publikasi dan promosi nilai-nilai Konferensi Asia Afrika, meliputi kegiatan <i>Community Outreach</i> antara lain sosialisasi, pameran, seminar, pelayanan kunjungan, pelayanan penelitian dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan publikasi dan promosi nilai-nilai KAA.
DM.06.02	Pelestarian dan Dokumentasi Diplomasi Publik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan dokumentasi diplomasi publik, khususnya sejarah Konferensi Asia Afrika dan pengembangannya, antara lain kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan/restorasi, dan akuisisi benda koleksi, pengembangan perpustakaan, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelestarian benda koleksi dan dokumen sejarah KAA.
DM.07	Kerja Sama Pembangunan Internasional	
DM.07.01	Wilayah Asia dan Pasifik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kerja sama pembangunan internasional yang meliputi pemberian hibah, bantuan pembangunan, kerja sama teknik, pemberdayaan kapasitas kepada pemerintah asing dan lembaga asing di wilayah Asia dan Pasifik.
DM.07.02	Wilayah Amerika dan Eropa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kerja sama pembangunan internasional yang meliputi pemberian hibah, bantuan pembangunan, kerja sama teknik, pemberdayaan kapasitas kepada pemerintah asing dan lembaga asing di wilayah Amerika dan Eropa.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
DM.07.03	Wilayah Afrika dan Timur Tengah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kerja sama pembangunan internasional yang meliputi pemberian hibah, bantuan pembangunan, kerja sama teknik, pemberdayaan kapasitas kepada pemerintah asing dan lembaga asing di wilayah Afrika dan Timur Tengah.
DM.07.04	Organisasi Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kerja sama pembangunan internasional yang meliputi pemberian hibah, bantuan pembangunan, kerja sama teknik, pemberdayaan kapasitas kepada pemerintah asing dan lembaga asing pada Organisasi Internasional.
DM.08	Kebijakan Pemberitaan	
DM.08.01	Pembuatan Berita	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang informasi dan media dalam hal pembuatan berita untuk keperluan penyampaian informasi dan pembentukan opini publik untuk kepentingan Republik Indonesia di dalam dan luar negeri.
DM.08.02	Pengelolaan Informasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang informasi dan media dalam hal liputan berita, media massa, kliping, transkripsi, dokumentasi kegiatan kementerian dan perwakilan, publikasi, pemanfaatan multimedia & media sosial, serta monitoring berita media asing dan nasional untuk keperluan penyampaian informasi dan pembentukan opini publik untuk kepentingan Republik Indonesia di dalam dan luar negeri.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
DM. 09	Fasilitasi Media Massa	
DM.09.01	Akreditasi Wartawan Asing	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi wartawan asing.
DM.09.02	Kerja Sama dengan Media	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan kerja sama dengan media.
DM.09.03	Layanan Wartawan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan layanan wartawan.
DM.10	Pelayanan Informasi Publik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan informasi publik.
AD	KEAMANAN DIPLOMATIK	
AD.01	Keamanan Diplomatik	
AD.01.01	Pengamanan Fisik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan diplomatik.
AD.01.02	Pengamanan Informasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan informasi politik, hukum dan keamanan, serta ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka penyelenggaraan keamanan diplomatik.
AD.01.03	Pengamanan Personel	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan personel dalam pelaksanaan kegiatan sidang internasional di Indonesia atau kegiatan lainnya yang terkait dengan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan pengamanan personel perwakilan asing yang berkedudukan di Indonesia.
AD.02	Kerja Sama Keamanan Diplomatik	
AD.02.01	Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama bidang keamanan diplomatik mengenai isu strategis dan kerja sama antar lembaga untuk pengamanan dalam negeri.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
AD.02.02	Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama bidang keamanan diplomatik mengenai isu strategis dan kerja sama antar lembaga untuk pengamanan luar negeri.
AD.03	Perizinan Organisasi Kemasyarakatan Asing	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan pelaksanaan perizinan organisasi kemasyarakatan asing.
AD.04	Evaluasi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perwakilan rawan dan perwakilan berbahaya.
PK.	PROTOKOL DAN KONSULER	
PK.01	Layanan Keprotokolan	
PK.01.01	Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden Keluar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan keprotokolan yang meliputi pengaturan acara kenegaraan dan acara resmi Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri.
PK.01.02	Tamu Negara Asing	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan keprotokolan yang meliputi fasilitasi kedatangan dan keberangkatan, serta pengaturan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan dan jamuan dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi tamu negara asing di Indonesia.
PK.01.03	Dukungan Keprotokolan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan keprotokolan yang meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, serta tata penghormatan dalam acara resmi Menteri dan Wakil Menteri di dalam dan luar negeri.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
PK.01.04	Upacara Diplomatik dan Tanda Jasa Kehormatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan keprotokolan yang meliputi pengaturan persiapan dan pelaksanaan upacara penyerahan Surat Kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia, upacara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada warga negara asing, pengaturan dan fasilitasi kehadiran Pejabat Negara setingkat Menteri sebagai tamu kehormatan pada resepsi diplomatik Perwakilan Negara Asing di Indonesia, fasilitasi penyambutan dan pelepasan di bandara bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat yang akan memulai dan yang telah mengakhiri misi diplomatik di Indonesia serta memperbarui data daftar tata urutan korps diplomatik asing di Indonesia.
PK.01.05	Pertemuan Internasional dan Kerja Sama Antar Lembaga	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan protokol mengenai pengaturan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan dalam pertemuan internasional di Indonesia yang dihadiri oleh Kepala Negara/Pemerintahan, Kepala Lembaga, Menteri, Pejabat Tinggi negara asing dan dalam acara lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang menghadirkan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia.
PK.02	Layanan Kekonsuleran	
PK.02.01	Layanan Paspor Diplomatik dan Dinas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pendataan dan pengawasan paspor diplomatik dan dinas Republik Indonesia, izin berangkat ke luar negeri (<i>exit permit</i>), rekomendasi visa diplomatik dan dinas.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
PK.02.02	Visa Diplomatik dan Dinas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan permohonan visa dari pejabat pemerintah/militer negara asing, tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan pejabat dari Organisasi Internasional yang diajukan melalui Perwakilan Republik Indonesia.
PK.02.03	Perizinan Tinggal Diplomatik dan Dinas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan izin tinggal diplomatik dan dinas, <i>Exit Permit Only</i> serta surat pengantar pengurusan izin tinggal biasa bagi warga negara asing di Indonesia dan pemegang surat perjalanan laksana paspor PBB.
PK.02.04	Perizinan Penerbangan, Pelayaran dan Legalisasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perizinan diplomatik bagi penerbangan dan pelayaran asing, penerbitan <i>exit permit only</i> , legalisasi dokumen asing yang akan digunakan di Indonesia dan dokumen Indonesia yang akan digunakan di luar negeri.
PK.02.05	Jasa Kekonsuleran Warga Negara Asing	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan notifikasi kekonsuleran warga negara asing bermasalah di Indonesia, fasilitasi akses kekonsuleran kepada Perwakilan Negara Asing yang berkaitan dengan masalah non-yudisial dan kerja sama kekonsuleran.
PK.03	Fasilitas Diplomatik	-
PK.03.01	Kendaraan Bermotor	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas diplomatik yang meliputi perizinan fasilitas kendaraan bermotor dan nomor polisi kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional serta pejabatnya, dan pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negara asing kepada Perwakilan Republik Indonesia.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
PK.03.02	Perpajakan dan Pengendalian Asas Resiprositas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas diplomatik yang meliputi fasilitas perpajakan bagi perwakilan negara asing dan organisasi internasional, evaluasi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negara asing kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan fasilitas diplomatik yang dapat diberikan bagi perwakilan negara asing dan organisasi internasional di Indonesia serta data fasilitas berdasarkan asas resiprositas.
PK.03.03	Akreditasi dan Fasilitas Kunjungan Daerah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas diplomatik yang meliputi status akreditasi, penerbitan kartu tanda pengenal, fasilitas kunjungan daerah, dan pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negara asing kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, perijinan dan pendampingan kunjungan daerah pejabat perwakilan asing dan organisasi internasional.
PK.03.04	Perijinan Bangunan, Senjata Api dan Alat Komunikasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas diplomatik yang meliputi perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, senjata api untuk pengawal tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara asing, perizinan dan pengawasan terhadap pembelian dan penjualan properti, dan perizinan renovasi bangunan, serta pemantauan atas pemberian fasilitas perizinan dan bangunan bagi perwakilan negara asing dan organisasi internasional.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
PK.03.05	Barang Diplomatik dan Pas Bandara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan fasilitas diplomatik yang meliputi pemantauan dan perizinan terhadap fasilitas pembebasan bea masuk barang, kantong diplomatik, dan pembuatan kartu kendali importasi minuman keras dan produk tembakau, dan penerbitan surat rekomendasi permohonan pas bandara dan pelabuhan bagi perwakilan negara asing dan pejabatnya, serta evaluasi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negara asing kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
PK.04	Pemberian Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI)	
PK.04.01	Penyelesaian Kasus Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian pelindungan diplomatik dan konsuler, bantuan sosial, pemberian bantuan hukum, fasilitasi layanan kesehatan, fasilitasi pemulangan, pemberian bantuan penampungan sementara, dan evakuasi di luar negeri.
PK.04.02	Kelembagaan dan Diplomasi Pelindungan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan pelindungan warga Indonesia di luar negeri yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan kerja sama sama melalui harmonisasi regulasi dan kebijakan, penyusunan dan pengelolaan kerja sama di tingkat nasional dan internasional, kerja sama pelindungan WNI meliputi <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , <i>Letter of Intent (LoI)</i> , <i>agreement</i> lainnya, pemantauan dan evaluasi pelayanan dan pelindungan WNI di Perwakilan, serta penyelenggaraan pelatihan dan kampanye penyadaran publik.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
PK.04.03	Sistem dan Teknologi Informasi Pelayanan Kekonsuleran dan Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi pelayanan kekonsuleran dan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri melalui pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan kerja sama pemanfaatan dan interoperabilitas serta laporan pengelolaan sistem pelayanan kekonsuleran dan pelindungan WNI.
PK.04.04	Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan Award (HWPA)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penghargaan di bidang pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
SJ.	STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	
SJ.01	Perumusan Kebijakan Teknis Rencana dan Program	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis rencana, kinerja dan program strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kawasan Asia Pasifik dan Afrika, kawasan Amerika dan Eropa, multilateral dan isu khusus.
SJ.02	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis strategi kebijakan yang meliputi izin pengkajian dan pengembangan, data primer dan tinjauan pustaka, pengolahan data, analisis data dan laporan hasil kajian/pengembangan serta pemberian rekomendasi kebijakan dan isu khusus di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kawasan Asia Pasifik dan Afrika kawasan Amerika dan Eropa, multilateral dan isu khusus.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
SJ.03	Kerja Sama Kajian	
SJ.03.01	Kerja Sama Kajian dengan Universitas Dalam Negeri dan Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama kajian yang meliputi perjanjian kerja sama dan hasil kajian dengan universitas dalam negeri dan luar negeri di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
SJ.03.02	Kerja Sama Kajian dengan Lembaga Dalam Negeri, Luar Negeri (ICWA) dan Lembaga Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama kajian yang meliputi perjanjian kerja sama dan hasil kajian dengan lembaga dalam negeri, luar negeri (ICWA) dan lembaga internasional di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
SJ.03.03	Kerja Sama Sinkronisasi Data Analisis	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama sinkronisasi data analisis, hasil rekomendasi strategi kebijakan dan isu khusus, serta hasil penetapan strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
SJ.04	Kertas Kerja Strategi Kebijakan dan Isu Khusus	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan kertas kerja strategi kebijakan dan isu khusus.
SJ.05	Publikasi dan Diseminasi Informasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan publikasi serta diseminasi informasi yang meliputi laporan koordinasi, laporan hasil diseminasi dan debriefing.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
SJ.06	Pemantauan dan Evaluasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan strategi kebijakan dan isu khusus di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kawasan Asia Pasifik dan Afrika, kawasan Amerika dan Eropa, multilateral.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

KODE KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

A. FUNGSI FASILITATIF

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
1	PR.	PERENCANAAN	
	PR.01	Perumusan Kebijakan dan Strategi Pembangunan	
	PR.01.01	Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP).
	PR.01.02	Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PR.01.03	Rencana Strategis (Renstra)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan Rencana Strategis (Renstra).
	PR.02	Penyusunan Program/Rencana Kerja	
	PR.02.01	Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan (KAK/RAB)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kegiatan meliputi: KAK/RAB.
	PR.02.02	Penyusunan Program/Rencana Kerja Tahunan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Program/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian dan Perwakilan.
	PR.02.03	Penyusunan Rencana Kerja berdasar Pagu Indikatif	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja Berdasar Pagu Indikatif.
	PR.02.04	Penyusunan Program dan Anggaran Berdasar Inisiasi Baru	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Program dan Anggaran Berdasar inisiasi baru.
	PR.03	Perencanaan Anggaran	
	PR.03.01	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan. pemberian panduan dan pedoman perencanaan dan penyusunan rencana kerja anggaran, meliputi RKAKL Pagu Indikatif, RKAKL Pagu Definitif, Surat Rincian Alokasi Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Murni dan POK Awal.
	PR.03.02	Rencana Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, pemberian panduan dan pedoman perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP).

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PR.03.03	Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, pemberian panduan dan pedoman perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL).
	PR.03.04	Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian kepada DPR RI	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan penyampaian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian kepada DPR RI.
	PR.03.05	Perumusan Usulan Standar Biaya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi perumusan usulan standar biaya, meliputi: usulan standar harga satuan perencanaan barang (SHSPB), usulan standar biaya khusus, usulan standar biaya masukan dan biaya keluaran.
	PR.03.06	Revisi DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi penyusunan dan pemberian panduan dan pedoman, pengusulan dan penelitian revisi anggaran.
	PR.03.07	Anggaran Biaya Tambahan (ABT)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi penyusunan dan pemberian panduan dan pedoman, pengusulan dan penelitian Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
	PR.04	Perjanjian Kinerja / Penetapan / Kontrak Kerja	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi penyusunan dan pemberian panduan/pedoman penyusunan perjanjian/kontrak kinerja, pelaporan kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja dan program kegiatan serta kinerja anggaran.
	PR.05	Pelaporan dan Evaluasi	
	PR.05.01	Laporan Berkala	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan yang meliputi: laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, laporan tahunan knit Kerja, laporan tahunan kementerian.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PR.05.02	Laporan Insidental/khusus	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan insidental/khusus.
	PR.05.03	Laporan Perkembangan (<i>Progress Report</i>)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan perkembangan (<i>Progress Report</i>) untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun.
	PR.05.04	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
	PR.05.05	Penyusunan Ketentuan/Peraturan Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Petunjuk/Peraturan Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
	PR.05.06	Laporan Hasil Evaluasi Program/Anggaran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan Hasil Evaluasi Program atau Anggaran.
2	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
	OT.01	Penataan Kelembagaan	
	OT.01.01	Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Perwakilan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, penataan organisasi dan tata kerja dan pemberian panduan dan pedoman di bidang penataan organisasi di Perwakilan Republik Indonesia, fasilitas pembukaan hubungan diplomatik, pembentukan, pengubahan, pembubaran/restrukturisasi dan penutupan kantor perwakilan Republik Indonesia serta pengaturan pejabat penugasan serta lembaga teknis pada Perwakilan Republik Indonesia.
	OT.01.02	Analisis dan Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Perwakilan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi analisis dan evaluasi kelembagaan.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	OT.02	Penata Tata Laksana dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
	OT.02.01	Penyusunan dan Penyelarasan Proses Bisnis	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi ketatalaksanaan, penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur kerja.
	OT.02.02	Pelaksanaan Evaluasi dan Proses Bisnis	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pemantauan dan evaluasi ketatalaksanaan, penyusunan proses bisnis.
	OT.02.03	Penyusunan dan penyelarasan SOP	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ketatalaksanaan meliputi pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan penyelarasan SOP.
	OT.02.04	Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pemantauan dan evaluasi ketatalaksanaan, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur kerja.
	OT.02.05	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan data dan dokumen reformasi birokrasi.
	OT.03	Analisis dan Evaluasi Jabatan	
	OT.03.01	Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan Struktural	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan serta pemberian panduan/pedoman mengenai informasi jabatan dan analisis jabatan, uraian tugas dan spesifikasi atau persyaratan jabatan struktural
	OT.03.02	Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan Fungsional Tertentu	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian panduan/pedoman mengenai informasi jabatan dan analisis jabatan, uraian tugas dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional tertentu

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	OT.03.03	Informasi Jabatan dan Analisis Jabatan Fungsional Umum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan serta pemberian panduan/pedoman mengenai informasi jabatan dan analisis jabatan, uraian tugas dan spesifikasi atau persyaratan jabatan fungsional Umum
	OT.03.04	Analisis Beban Kerja	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penelaahan serta pemberian panduan/pedoman mengenai perhitungan analisis beban kerja dan pemetaan kekuatan pegawai di unit kerja.
	OT.03.05	Evaluasi Jabatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi analisis dan evaluasi jabatan.
3	KU.	KEUANGAN	
	KU.01	Perencanaan Anggaran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan penyusunan anggaran yang meliputi Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Bapenas mengenai Pagu Indikatif, Kesepakatan bersama Menteri Keuangan dengan DPR mengenai Pagu Definitif, Kerja Anggaran (RKA) Kementerian /Lembaga Negara, Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara, Penyusunan RAPBN, Penyampaian RAPBN kepada DPR, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Keputusan Presiden tentang Rincian APBN, DIPA, RUU-APBN-P, Notulen Pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR, Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P, UU APBN-P dan Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P.
	KU.02	Pelaksanaan Anggaran	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KU.02.01	Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan menyangkut pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran.
	KU.02.02	Realisasi Pendapatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja (SSPB), Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank, Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja, Dokumen Piutang Negara dan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara.
	KU.03	Belanja/Pengeluaran Anggaran	
	KU.03.01	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran pelaksanaan pengadaan barang /jasa meliputi: Barang Habis Pakai, Barang Inventaris, Jasa, <i>Software</i> Komputer.
	KU.03.02	Pembayaran Keuangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen pembayaran keuangan meliputi: Pengajuan Keputusan Penarikan Kas, Bukti-bukti tagihan dari pihak ketiga, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencaitan Dana (SP2D) Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA), Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) dan Beban Pusat Perjalanan Dinas (BP Jaldis).

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KU.03.03	Tata Usaha Anggaran	Arsp atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Tata Usaha Anggaran meliputi: Buku Kas Umum (BKU), Buku kas Pembantu, Buku/Karto Pengawasan Kredit Anggaran. Rekening Koran Bank, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK), Daftar Rekapitulasi Pihak Ketiga, Daftar Rekapitulasi PNBPN, Ijin Penggunaan Kas Besi.
	KU.03.04	Daftar Gaji	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Daftar, Gaji, Tunjangan/Lembur.
	KU.03.05	Kartu Gaji	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Kartu Gaji.
	KU.03.06	Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI	Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional.
	KU.03.07	Akutansi Keuangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan Akutansi Keuangan meliputi: Berita Acara Pemeriksaan Kas, Kas/Register Penutupan Kas, Arsip Data Komputer (ADK), Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan KPPN.
	KU.03.08	Verifikasi Anggaran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan Verifikasi Anggaran meliputi: Nota Hasil Verifikasi (NHV), Jawaban Nota Hasil Verifikasi (JNHV).
	KU.03.09	Laporan Keuangan Tahunan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Barang Milik Negara (BMN), Laporan Realisasi Pendapatan Negara.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KU.04	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Daftar Proyek-proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>), Dokumen Kesanggupan negara donor membiayai (<i>Green Book</i>), Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan sejenisnya, Dokumen <i>Loan Agreement</i> , Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN, <i>Legal opinion</i> , Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan <i>Lender</i> , Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>), Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor (<i>Replenishment</i>), <i>Staff Appraisal Report</i> , <i>Report/Laporan</i> , Laporan Hutang Negara dan Keterangan yang menyangkut Pinjaman /Hibah Luar Negeri.
	KU.05	Pengelola APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelola APBN untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Pengelola Barang, termasuk berita acara serah terima jabatan.
	KU.06	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Kebijakan Akuntansi, Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Realisasi Semesteran APBN.
	KU.07	Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumen penyelesaian kerugian negara meliputi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
4	KP	KEPEGAWAIAN	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KP.01	Penyusunan Formasi Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan formasi pegawai mulai dari Usulan kebutuhan pegawai dari Unit Kerja, Usulan Permintaan formasi kepada Menpan RB dan BKN, Persetujuan Formasi dari Menpan dan BKN, Penetapan Formasi dan Penetapan Formasi Khusus.
	KP.02	Pengadaan Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan pegawai mulai dari penerimaan pegawai, Masa Percobaan PNS/ASN, pengangkatan baik Aparatur Sipil Negara pada Kementeriann, Pengadaan PPPK, Pengangkatan PPPK dan Pegawai Setempat pada Perwakilan, mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes sampai dengan pengumuman penerimaan, pemeriksaan kesehatan, prajabatan sampai dengan penempatan pegawai di unit-unit kerja, Seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama, Madya dan Utama serta lamaran pegawai yang tidak diterima, pegawai setempat (<i>local staff</i>).
	KP.03	Pembinaan Karir Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi yang terkait pengembangan karir, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan sistem merit yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Prestasi Kerja (DUPAK/DUPNK), Pengaturan Kode Etik Pegawai, Hukuman Disiplin Pegawai, Pakta Integritas Pegawai, Penghargaan dan Tanda Jasa, Assesment/Profiling, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KP.04	Pembinaan Jabatan Fungsional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan rumusan kebijakan teknis dan standarisasi, pelaksanaan analisis kompetensi dan kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan fungsional yang dibina Kementerian, penilaian kompetensi dan sertifikasi jabatan, penilaian dan penetapan angka kredit, penyiapan, perencanaan dan pertimbangan pengangkatan, kenaikan jenjang, dan alih jabatan, pemindahan, pemberhentian/pemberhentian sementara ke dalam jabatan fungsional, layanan informasi, bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi jabatan serta pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi organisasi profesi jabatan fungsional.
	KP.05	Mutasi Pegawai	
	KP.05.01	Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kenaikan pangkat/golongan reguler, pilihan, dan istimewa mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.02	Kenaikan Gaji Berkala	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kenaikan gaji berkala mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.03	Penyesuaian Masa Kerja	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian masa kerja mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.04	Penyesuaian Tunjangan Keluarga	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.05	Mutasi Keluarga	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian mutasi keluarga meliputi cacah jiwa perkawinan, kelahiran, perceraian dan kematian mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KP.05.06	Penyesuaian Jabatan/Perubahan Pegawai Kelas Jabatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian kelas jabatan/perubahan jabatan pegawai mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.07	Rotasi Kerja	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian rotasi kerja mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.08	Alih Tugas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian alih tugas mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.05.09	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
	KP.06	Perselisihan/Sengketa Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa pegawai mulai dari usulan sampai dengan penetapannya.
	KP.07	Administrasi Pegawai	
	KP.07.01	Data/Keterangan Pegawai dan Presensi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan data/keterangan pegawai dan presensi.
	KP.07.02	Kartu Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.
	KP.07.03	Kartu Isteri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kartu isteri (KARIS)/kartu suami (KARSU).
	KP.07.04	Kartu Taspen	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kartu taspen.
	KP.07.05	Kartu Jaminan Kesehatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kartu jaminan kesehatan.
	KP.07.06	Cuti Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan cuti meliputi cuti tahunan, alasan penting, besar, sakit, bersalin dan cuti di luar tanggungan negara.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KP.08	Kesejahteraan Pegawai	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan layanan pemeliharaan kesejahteraan pegawai, asuransi pegawai, tabungan perumahan, bantuan sosial, pakaian dinas, pegawai meninggal karena dinas, pemberian tali kasih, layanan olahraga dan rekreasi, beasiswa pendidikan anak di luar negeri.
	KP.09	Pemberhentian Jabatan	
	KP.09.01	Dengan Hormat	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai meliputi atas permintaan sendiri, sudah mencapai usia pensiun, dan tidak atas permintaan sendiri (meninggal dunia) mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK pemberhentian termasuk didalamnya pensiun duda/janda/anak.
	KP.09.02	Tidak Dengan Hormat	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses pemberhentian pegawai dengan tidak hormat.
	KP.10	Pengelolaan Organisasi Non Kedinasan	
	KP.10.01	KORPRI	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan KORPRI.
	KP.10.02	Dharma Wanita	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Dharma Wanita.
	KP.10.03	Koperasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Koperasi.
	KP.10.04	Yayasan Upakara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan Upakara.
	KP.10.05	Organisasi Non Kedinasan lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi non kedinasan lainnya.
	KP.11	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	KP.11.01	Tingkat Madya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan seleksi terbuka jabatan tinggi tingkat madya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
	KP.11.02	Tingkat Pratama	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan seleksi terbuka jabatan tinggi tingkat pratama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
	KP.12	Pengelolaan Personal File	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan personal file mulai dari Surat Keputusan (SK) CPNS, pengangkatan pegawai sampai dengan pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Luar Negeri.
5	PL	PERLENGKAPAN	
	PL. 01	Rencana Pengadaan Barang	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan belanja modal dan barang serta analisis kebutuhan unit kerja dan kementerian yang meliputi peralatan fasilitas perkantoran, pengolahan data dan komunikasi, kendaraan dinas, instalasi/jaringan, tanah, bangunan, peralatan mesin dan listrik serta Aset Tak Berwujud (ATB).
	PL.02	Penawaran Barang dan Jasa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penawaran harga barang dan jasa termasuk data perusahaan.
	PL.03	Pengadaan Barang dan Jasa	
	PL.03.01	Telaahan pelaksanaan lelang/ pemilikan/penunjukan langsung	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan telaahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kementerian dan Perwakilan.
	PL.03.02	Penyiapan Dokumen Lelang	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan dokumen lelang pengadaan barang dan jasa meliputi TOR, Rencana Anggaran Belanja (RAB), Harga Perkiraan Sementara

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
			(HPS), spesifikasi barang dan jasa, desain dan gambar barang dan jasa.
	PL.03.03	Penunjukan Langsung	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan sistem penunjukan langsung mulai dari proses penawaran harga, penunjukan langsung, kontrak kerja sampai dengan serah terima barang.
	PL.04	Pengadaan Jasa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan jasa mulai dari proses penawaran harga, penunjukan langsung, kontrak kerja sampai dengan serah terima penyelesaian pekerjaan.
	PL.05	Penyimpanan dan Distribusi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bukti penyimpanan barang dan pendistribusian barang inventaris perlengkapan kantor dan barang habis pakai meliputi bukti barang masuk, bukti barang keluar, surat permintaan barang dari unit kerja, surat jalan pendistribusian inventaris perlengkapan kantor dan barang habis pakai sampai dengan berita acara serah terima barang ke unit kerja/pengguna barang.
	PL.06	Penggunaan Fasilitas Kantor	
	PL.06.01	Perlengkapan Kantor	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penggunaan perlengkapan kantor meliputi formulir peminjaman, permohonan peminjaman, rekap penggunaan perlengkapan kantor.
	PL.06.02	Kendaraan Dinas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penggunaan kendaraan dinas meliputi formulir peminjaman, permohonan peminjaman, rekap penggunaan.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PL.06.03	Ruangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penggunaan ruangan meliputi formulir peminjaman, permohonan peminjaman, rekap penggunaan.
	PL.07	Pengelolaan Dokumentasi dan Penatausahaan Aset Tanah dan Bangunan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi dan penatausahaan tanah dan bangunan, meliputi berkas peminjaman tanah dan bangunan, pengurusan sertifikat tanah negara dan berkas sengketa tanah negara.
	PL.08	Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Kementerian	
	PL.08.01	Personal	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Pengaturan jadwal piket/pengamanan penyiapan pengamanan fisik terhadap pimpinan, personal, dan tamu di lingkungan Kementerian.
	PL.08.02	Lingkungan Kantor	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan pengamanan fisik terhadap penanganan kegiatan demonstrasi, instalasi penting Kementerian termasuk peralatan, dokumen dan lingkungan.
	PL.09	Pengelolaan Barang Milik Negara	
	PL.09.01	Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP) barang milik negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
	PL.09.02	Pengelolaan Data Barang Milik Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan data barang milik negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan meliputi daftar barang kuasa pengguna, Kartu Identitas Barang (KIB) dan Daftar Barang Ruangan (DBR), pelaksanaan sampai dengan hasil inventarisasi BMN.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PL.09.03	Pengurusan Hibah Barang Milik Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan hibah barang milik negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
	PL.09.04	Penghapusan Barang Milik Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penghapusan barang milik negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
	PL.09.05	Pelaporan Barang Milik Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan barang milik negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan, meliputi laporan kondisi barang, berita acara rekonsiliasi eksternal dan internal, laporan persediaan habis pakai dan laporan persediaan tidak habis pakai.
	PL.09.06	Inventarisasi BMN	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pendataan Barang Milik Negara (BMN).
	PL.09.07	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan bimtek pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
	PL.10	Pemeliharaan	
	PL.10.01	Gedung dan Rumah Dinas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemeliharaan gedung dan rumah dinas sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan.
	PL.10.02	Peralatan Kantor	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan kantor sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan.
	PL.10.03	Kendaraan Dinas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas dan pengangkutan pegawai Kementerian sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PL.10.04	Peralatan Mesin dan Listrik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan mesin dan listrik sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan.
	PL.10.05	Urusan dalam Perkantoran	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan urusan dalam mulai dari pemeliharaan aset, pemeliharaan sarana prasarana fisik, pembayaran telepon, air, listrik, rumah dinas gedung kantor dan pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman.
	PL.11	Layanan Pengadaan	
	PL.11.01	Layanan Lelang Konstruksi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan pelaksanaan layanan lelang konstruksi dari proses pelaksanaan, evaluasi sampai pelaporan hasil lelang dan penyelesaian sanggahan.
	PL.11.02	Layanan Lelang Barang dan Seleksi Konsultan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan pelaksanaan layanan lelang barang dan seleksi konsultan dari proses pelaksanaan, evaluasi sampai pelaporan hasil lelang dan penyelesaian sanggahan.
	PL.11.03	Layanan Lelang Barang Jasa Lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan pelaksanaan layanan lelang barang jasa lainnya dari proses pelaksanaan, evaluasi, pelaporan hasil lelang dan penyelesaian sanggahan.
	PL.11.04	Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Jasa Pemerintah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia terkait kompetensi di bidang pengadaan jasa pemerintah.
6	HM.	KEHUMASAN	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	HM.01	Dukungan Hubungan Antar Lembaga	
	HM.01.01	Hubungan dengan Instansi Pusat, Lembaga/Pemerintah Daerah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi terkait urusan hubungan antar kementerian/lembaga, instansi pusat/lembaga/pemerintah daerah, pemberian dukungan penerjemah dan penerjemahan, serta pengelolaan bahan pemantauan arahan pimpinan dan isu prioritas.
	HM.01.02	Hubungan dengan Organisasi Nasional/Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi terkait urusan hubungan antar organisasi nasional dan internasional, pengelolaan bahan pemantauan arahan pimpinan dan isu prioritas.
	HM.01.03	Hubungan dengan Perusahaan (BUMN/BUMD/Swasta)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi terkait urusan hubungan dengan perusahaan (BUMN/BUMD/Swasta), pengelolaan bahan pemantauan arahan pimpinan dan isu prioritas.
	HM.01.04	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi terkait urusan hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, pengelolaan bahan pemantauan arahan pimpinan dan isu prioritas.
	HM.01.05	Kegiatan Forum Kehumasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi terkait urusan hubungan dengan forum kehumasan, pengelolaan bahan pemantauan arahan pimpinan dan isu prioritas.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	HM.01.06	Hubungan dengan Media Massa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, penghimpunan materi, pemantauan, analisis media dan perkembangan opini publik, pemberian dukungan diplomasi digital, pemberian dukungan substansi dan teknis kepada Menteri dan Wakil Menteri serta Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan sebagai Juru Bicara Kementerian dalam pelaksanaan keterangan pers, siaran pers, wawancara dan hubungan kerja dengan media.
	HM.02	Penghimpunan Dukungan Substansi Program Dalam Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi untuk menghimpun informasi dan bahan masukan mengenai substansi isu tematik dalam negeri di bidang politik, hukum dan keamanan serta hak asasi manusia, di bidang ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup, di bidang sosial budaya guna mendukung kegiatan Menteri dan Wakil Menteri.
	HM.03	Penghimpunan Dukungan Substansi Program Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi untuk menghimpun informasi dan bahan masukan mengenai substansi isu tematik luar negeri di bidang politik, hukum dan keamanan serta hak asasi manusia, di bidang ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup, di bidang sosial budaya, hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, kawasan Amerika Eropa dan organisasi intrakawasan dan hubungan antarnegara anggota ASEAN guna mendukung kegiatan Menteri dan Wakil Menteri.
	HM.04	Keprotokolan	
	HM.04.01	Penyelenggaraan acara kedinasan (pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara kedinasan meliputi: pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	HM.04.02	Penyelenggaraan Kegiatan Menteri dan Wakil Menteri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi pelaksanaan urusan kesekretariatan, penyiapan koordinasi bahan substansi, pemberian dukungan penerjemah dan penerjemahan untuk kegiatan Menteri dan Wakil Menteri serta pada pertemuan tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dan tingkat Menteri, pelaksanaan pemantauan arahan pimpinan dan isu prioritas
	HM.04.03	Kunjungan Dinas dalam dan luar negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri Menteri dan Wakil Menteri.
	HM.05	Dengar Pendapat/Hearing DPR	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan kegiatan dengar pendapat/ <i>hearing</i> dengan DPR.
	HM.06	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perseorangan yang memiliki jasa atau prestasi.
	HM.07	Pemberian Ucapan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan belasungkawa dan ucapan permohonan maaf.
7	HK	HUKUM	
	HK.01	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan penyiapan koordinasi, penelaahan, perumusan, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dari awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan di undangkan, meliputi Peraturan Menteri Luar Negeri, Keputusan/Ketetapan Menteri Luar Negeri, Instruksi/Surat Edaran Menteri Luar Negeri, Keputusan/Ketetapan Pejabat Eselon I, dan Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
			Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat institusional/instansional/nasional/regional.
	HK.02	Pemberian Pertimbangan Hukum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi pemberian pertimbangan hukum naskah dinas pengaturan dan penetapan dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan serta penyusunan perjanjian antarkementerian/lembaga dan/atau nonkementerian/lembaga.
	HK.03	Pelayanan Advokasi Hukum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan/ konsultasi hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan agama di lingkungan Kementerian dan Perwakilan terkait aspek perlengkapan dan keuangan, serta pendampingan kepada pejabat, pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, serta penyusunan bahan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk penyelesaian kasus yang membutuhkan bantuan pihak eksternal.
	HK.04	Kasus/Sengketa Hukum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, analisis kasus/sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase meliputi proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis, pembelaan dan bantuan hukum serta telaah hukum dan opini hukum.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	HK.05	Perizinan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi terkait naskah dinas perizinan dalam aspek kepegawaian.
	HK.06	Pengkajian Produk Hukum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi layanan hukum, pengkajian produk hukum serta dukungan advokasi hukum, aspek kepegawaian, organisasi, keuangan dan perlengkapan, meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dan peraturan/kebijakan negara sahabat.
	HK.07	Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi, dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang terkait dengan Kementerian dan Perwakilan.
8	DL	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	DL.01	Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum, program, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
	DL.02	Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan modul-modul diklat, analisis kebutuhan materi/bahan ajar pendidikan dan pelatihan.
	DL.03	Panduan Fasilitator	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan fasilitas pendukung pembelajaran.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	DL.04	Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan usulan dan rekomendasi program dan kegiatan serta tenaga pengajar, widyaiswara, pengelola dan kerja sama pendidikan dan pelatihan.
	DL.05	Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan rapat koordinasi kebijakan penyelenggaraan, pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan
	DL.06	Penyusunan Rencana Tahunan Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana tahunan pendidikan dan pelatihan dan pembinaan dan pengawasan Sekolah Indonesia di luar negeri.
	DL.07	Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan peninjauan, pelaksanaan, pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta, organisasi internasional serta lembaga nasional dan internasional lainnya, pemantauan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan non gelar, pemantauan pelaksanaan urusan tugas belajar, dan pembinaan serta pengawasan Sekolah Indonesia di luar negeri.
	DL.08	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mulai dari surat pemanggilan peserta diklat, pembentukan SK Tim sampai dengan penyampaian Sertifikat/STTPL kepada peserta diklat.
	DL.09	Jenis penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	DL.09.01	Diklat Prajabatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kurikulum, program, dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan CPNS untuk menjadi ASN/PNS.
	DL.09.02	Diklat Diplomatik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kurikulum, program, dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kompetensi jabatan fungsional diplomat di bidang diplomasi dan hubungan politik luar negeri.
	DL.09.03	Diklat Nondiplomatik dan Teknis	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kurikulum, program, dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kompetensi jabatan fungsional nondiplomatik dan teknis.
	DL.09.04	Diklat Struktural	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kurikulum, program, dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kompetensi pejabat struktural.
	DL.09.05	Diklat Fungsional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kurikulum, program, dan tenaga pengajar, serta penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kompetensi pejabat fungsional.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	DL.10	Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, instrumen dan fasilitas yang menjadi penjamin mutu serta akreditasi dalam rangka penilaian pengakuan peringkat kelayakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
	DL.11	Sertifikasi Sumber Daya Manusia	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta penerbitan Sertifikat/STTP Pendidikan dan Pelatihan.
	DL.12	Penyusunan Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan sistem informasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
	DL.13	Pelaksanaan Registrasi Sertifikat/STTP Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan registrasi sertifikat/STTP Peserta.
	DL.14	Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan diklat meliputi: kurikulum diklat, modul dan bahan ajar, data peserta diklat, tenaga pengajar dan widyaiswara, penyelenggaraan diklat dan sertifikat pendidikan dan pelatihan.
	DL.15	Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	DL.16	Pemantauan dan Evaluasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi program dan kegiatan, pengembangan kelembagaan, penjaminan mutu dan akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan, pengelolaan fasilitas pendukung pembelajaran, pembinaan dan pengawasan Sekolah Indonesia di luar negeri serta pelaksanaan urusan tugas belajar.
9	TK	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
	TK.01	Penyusunan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, data digital diplomatik, Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Persandian Diplomatik yang meliputi Standar, Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Prosedur TIK.
	TK.02	Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
	TK.02.01	Rencana Strategi/ <i>Master Plan</i> Pembangunan SPBE	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis/ <i>Master Plan</i> .
	TK.02.02	Arsitektur dan Implementasi terkait SPBE	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Persandian Diplomatik.
	TK.02.03	Rencana Induk/Peta Rencana SPBE dan Persandian Diplomatik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Induk/Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Persandian Diplomatik.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	TK.03	Pembinaan Kepatuhan terhadap Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kepatuhan terhadap kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta standar/prosedur bidang: TIK data digital diplomatik, sistem komunikasi terpadu, keamanan informasi, dan persandian diplomatik.
	TK.04	Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
	TK.04.01	Pemutakhiran Data	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi digital diplomatik, Pemutakhiran Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), manajemen keamanan informasi dan persandian diplomatik.
	TK.04.02	Pengelolaan <i>Server</i> , Data dan Informasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan server, Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
	TK.05	Layanan Pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	
	TK.05.01	Layanan dan Dukungan Teknis Infrastruktur TIK	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi pemberian layanan dan dukungan teknis infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
	TK.05.02	<i>Helpdesk</i> TIK/Penanganan keluhan Aplikasi Sistem Informasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi <i>helpdesk</i> di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	TK.05.03	Pengelolaan Pustaka Infrastruktur TIK	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi pengelolaan pustaka infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
	TK.06	Monitoring dan Evaluasi	
	TK.06.01	Penyelenggaraan terkait SPBE dan Persandian Diplomatik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan capaian tingkat layanan (<i>Service Level Agreement</i>) TIK; Laporan Penerapan manajemen resiko SPBE dan Persandian Diplomatik; Laporan Evaluasi Layanan TIK; Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian RISTIK, Pembinaan SDM, dan Proses TIK; Laporan Capaian Penerapan Rencana Induk/Peta Rencana SPBE; Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi.
	TK.06.02	Pelaksanaan TIK	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TIK.
10	AR	KEARSIPAN	
	AR.01	Penyusunan Instrumen Kearsipan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan instrumen kearsipan meliputi tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip, serta petunjuk pelaksanaan dan SOP kearsipan.
	AR.02	Pengendalian dan Pengurusan Surat	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penanganan dan pengurusan naskah dinas masuk/keluar yang meliputi: penerimaan, pencatatan, pengendalian dan pendistribusian dengan menggunakan sarana berupa kartu kendali, lembar pengantar, lembar disposisi, buku agenda dan buku ekspedisi.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	AR.03	Penyimpanan dan Pemeliharaan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberkasan, penataan dan penyimpanan arsip serta alih media arsip, dan layanan peminjaman arsip.
	AR.04	Penyusutan Arsip	
	AR.04.01	Pemindahan Arsip	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke Sentral Arsip Inaktif/ <i>Records Center</i> mulai dari penilaian arsip, pembuatan Daftar Arsip yang Dipindahkan, verifikasi arsip yang dipindahkan, sampai dengan Berita Acara Pemindahan Arsip.
	AR.04.02	Pemusnahan Arsip	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemusnahan arsip di Sentral Arsip Inaktif/ <i>Records Center</i> mulai dari penilaian arsip, pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah, verifikasi arsip yang akan dimusnahkan, penyusunan Daftar Arsip Musnah, persetujuan pemusnahan arsip, sampai dengan Berita Acara Pemusnahan Arsip.
	AR.04.03	Penyerahan Arsip Statis	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia dari penilaian arsip, pembuatan Daftar Arsip Usul Serah, verifikasi arsip yang akan diserahkan, penyusunan Daftar Arsip Serah, persetujuan penyerahan arsip sampai dengan Berita Acara Penyerahan Arsip.
	AR.05	Layanan Administrasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi pencalonan Kepala Perwakilan Republik Indonesia, perizinan, surat-surat kepercayaan, pengangkatan dan pemberhentian serta layanan administrasi lainnya bagi Kepala Perwakilan, Konsul Kehormatan, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Pejabat Khusus, serta hal-hal yang terkait dengan pengelolaan kantong diplomatik.
	AR.06	Pembinaan Kearsipan	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	AR.06.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan Arsiparis/pengelola arsip meliputi bimbingan teknis kearsipan, supervisi di bidang kearsipan dan penilaian kinerja Arsiparis/pengelola arsip yang berprestasi.
	AR.06.02	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kearsipan.
	AR.07	Pengawasan Kearsipan	
	AR.07.01	Pengawasan Internal	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan kearsipan internal yang meliputi perencanaan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT), pelaksanaan audit kearsipan, supervisi, Ringkasan Hasil Audit Sementara (RHAS) dan pelaporan (Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)).
	AR.07.02	Pengawasan Eksternal	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan kearsipan eksternal yang meliputi perencanaan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT), pelaksanaan audit kearsipan, supervisi, Ringkasan Hasil Audit Sementara (RHAS) dan pelaporan (Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)).
11	PS.	KEPUSTAKAAN	
	PS.01	Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka	
	PS.01.01	Penerimaan Koleksi bahan Pustaka	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan koleksi sampai penempatan di rak atau tempat yang telah disediakan.
	PS.01.02	Pengelolaan Koleksi bahan pustaka	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana operasional, registrasi bahan pustaka, pengecapan atau stempel perpustakaan, menentukan sistem klasifikasi dan kelengkapan lainnya berupa label, kartu, slip dan sampul buku.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PS.02	Pengadaan Bahan Pustaka	
	PS.02.01	Pencatatan Buku Induk Koleksi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan pengadaan bahan pustaka dengan buku induk koleksi.
	PS.02.02	Pencatatan Daftar pada Buku Koleksi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan pengadaan bahan pustaka dengan daftar buku induk koleksi.
	PS.02.03	Pemesanan Buku	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemesanan pengadaan bahan pustaka.
	PS.02.04	Permintaan Buku	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan permintaan pengadaan bahan pustaka.
	PS.02.05	Penerimaan Bahan Pustaka Hasil Pembelian, Hadiah Deposit, Hibah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan koleksi bahan pustaka melalui proses pembelian, hadiah deposit maupun hibah.
	PS.02.06	Pengiriman Bahan Pustaka Surplus	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman koleksi bahan pustaka yang surplus.
	PS.02.07	Pengkatalogan (Proses Katalogisasi)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses pengkatalogisian bahan pustaka.
	PS.02.08	Perancangan Jajaran Kartu Utama	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perancangan pada sistem komputer dalam mengolah, menyimpan dan menggunakan koleksi dalam rangka pembuatan jajaran kartu utama.
	PS.02.09	Penambahan Buku Koleksi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penambahan koleksi bahan pustaka.
	PS.02.10	Perancangan Kartu, Slip Buku berdasarkan Subjek dan Pengarang	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perancangan kartu, slip buku koleksi bahan pustaka berdasarkan subjek dan pengarang.
	PS.03	Layanan Perpustakaan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan layanan perpustakaan meliputi peminjaman dan penggunaan bahan Pustaka.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
12.	PW	PENGAWASAN	
	PW.01	Pedoman Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan himpunan produk hukum, perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Pengawasan Intern dan pengawasan lainnya.
	PW.02	Rencana Program Pengawasan	
	PW.02.01	Rencana Strategis Pengawasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan strategis kebijakan dan pendanaan serta program kegiatan pengawasan.
	PW.02.02	Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
	PW.02.03	Rencana Kinerja Pengawasan, Penetapan Kinerja Pengawasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pengawasan.
	PW.03	Audit	
	PW.03.01	Audit keuangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas organisasi/unit kerja, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
	PW.03.02	Audit Kinerja	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdiri atas aspek kepatuhan, kehematan, efisiensi dan efektifitas organisasi/unit kerja, meliputi perencanaan dan tindak lanjut hasil audit.
	PW.03.03	Audit Kebijakan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PW.03.04	<i>Probity</i> Audit	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan <i>probity</i> audit meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
	PW.03.05	Audit Berbasis Resiko	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit berbasis resiko meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
	PW.03.06	Audit dengan Tujuan Tertentu	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit tujuan tertentu, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
	PW.04	Reviu	
	PW.04.01	Reviu Laporan Keuangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reviu laporan keuangan baik semesteran dan tahunan meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
	PW.04.02	Reviu RKA-KL	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reviu RKA-KL meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
	PW.04.03	Reviu Lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reviu laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), BMN, Revisi Anggaran, Aspek Keuangan Tertentu, Aspek Kinerja Tertentu, Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dan Hasil Kajian Pengawasan tertentu baik semesteran dan tahunan meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
	PW.05	Evaluasi	
	PW.05.01	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
			meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
	PW.05.02	Evaluasi Reformasi dan Birokrasi (RB)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pelaksanaan RB dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian.
	PW.05.03	Evaluasi Program Lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi program meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.
	PW.06	Pemantauan/Monitoring	
	PW.06.01	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan kegiatan/program unit kerja meliputi perencanaan hingga pelaporan.
	PW.06.02	Pemantauan Lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan lainnya selain pemantauan kegiatan/program unit kerja meliputi perencanaan hingga pelaporan.
	PW.07	Pengaduan Masyarakat	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dan <i>Whistleblowing System</i> .
	PW.08	Laporan Hasil Pengawasan	
	PW.08.01	Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik yang disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK maupun BPKP serta tanggapan atas Laporan Hasil Pengawasan BPK mencakup Tindak Lanjut atas Laporan.
	PW.09	Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
	PW.09.01	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK meliputi data dukung tindak lanjut, pemantauan sampai dengan pelaporan.
	PW.09.02	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan BPKP	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPKP meliputi data dukung tindak lanjut, pemantauan sampai dengan pelaporan.
	PW.09.03	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan LHP Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti meliputi surat tugas sampai dengan pelaporan.
	PW.09.04	Pemutakhiran Data Kasus	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan input data kasus, pemutakhiran data kasus sampai dengan pelaporan tindak lanjut.
	PW.10	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
	PW.10.01	Pengendalian Gratifikasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi sampai dengan pelaporan.
	PW.10.02	Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Zona Integritas (WBK dan WBBM) sampai dengan pelaporan.
	PW.10.03	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian SPIP.
	PW.10.04	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Arsip atau rekaman kegiatan, peristiwa dan surat yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKASN.
	PW.11	Kegiatan Pengawasan Lainnya	
	PW.11.01	Konsultasi dan Asistensi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembimbingan dan konsultasi serta pendampingan dan supervisi

NO. URUT	KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
			atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/program kerja/anggaran.
	PW.11.02	Diseminasi di bidang Pengawasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemberian atau pendistribusian informasi, sosialisasi terkait kebijakan pengawasan.
	PW.11.03	Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas)/Rapat Koordinasi Pengawas (Rakorwas)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Rakerwas/Rakorwas yang meliputi surat penugasan, surat undangan, narasumber sampai dengan pelaporan.
	PW.11.04	Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pemberian Keterangan Ahli, dan kegiatan lainnya terkait koordinasi dengan aparat hukum.
	PW.11.05	Sistem Informasi/Aplikasi Pengawasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bentuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi/aplikasi pengawasan, pengelolaan <i>data base</i> pengawasan.
	PW.11.06	Kapabilitas APIP (<i>Internal Audit Capability Model - IACM</i>)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek berupa peran dan layanan audit intern, pengelolaan SDM, praktik profesional, manajemen kinerja dan akuntabilitas, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola.

B. FUNGSI SUBSTANTIF

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK	HUBUNGAN BILATERAL, INTRAKAWASAN DAN ANTARKAWASAN	
BK.01	Perumusan Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumusan kebijakan, standarisasi teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), pedoman, petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan Bilateral, Intrakawasan dan Antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.
BK .02	Perundingan Kerja Sama Bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	
BK.02.01	Kawasan Asia Tenggara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Asia Tenggara meliputi negara: Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.02.02	Kawasan Asia Timur	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Asia Timur meliputi negara: Republik Rakyat Tiongkok (termasuk teritori Hong Kong SAR dan Macau SAR), Jepang, Republik Korea, Republik Demokratik Rakyat Korea dan Mongolia.
BK.02.03	Kawasan Pasifik dan Oseania	<p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral dan regional di kawasan Pasifik dan Oseania meliputi:</p> <p>a. Negara dan teritori: Australia, Kepulauan Cook, Kaledonia Baru, Kiribati, Federasi Mikronesia, Fiji, Kepulauan Marshall, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Polinesia Perancis, Samoa, Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.</p> <p>b. Forum Regional: African, <i>Caribbean and Pacific Group of States</i> (ACP), <i>Melanesian Spearhead Group</i> (MSG), <i>Pacific Islands Forum</i> (PIF), <i>Pacific Islands Development Forum</i> (PIDF) dan <i>Southwest Pacific Dialogue</i> (SwPD).</p>
BK.02.04	Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Asia Selatan dan Tengah meliputi negara: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan Turkmenistan, dan Uzbekistan.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.02.05	Kawasan Timur Tengah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Timur Tengah meliputi negara: Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Kuwait, Libya, Lebanon, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Sudan, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Yaman dan Yordania.
BK.02.06	Kawasan Afrika	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Afrika Sub Sahara meliputi negara: Nigeria, Benin, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kamerun, Republik Kongo, Liberia, Niger, Sao Tome and Principe, Togo, Chad, Republik Afrika Tengah, Guinea-Bissau, Mali, Pantai Gading, Sierra Leone, Ethiopia, Rwanda, Burundi, Djibouti, Tanzania, Eritrea, Kenya, Mozambik, Malawi, Uni Komoro, Madagaskar, Afrika Selatan, Lesotho, Eswatini, Botswana, Namibia, Angola, Zambia, dan Zimbabwe.
BK .03	Perundingan Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.03.01	Kawasan Asia Pasifik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi, Kerjasama dan perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan kerjasama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik, meliputi kerangka kerjasama dengan: <i>Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, Asian Parliamentary Assembly (APA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asia-Pacific Parliamentarians on Environment and Development (APPCED), IORA, Asia Middle East Dialogue (AMED), Gulf Cooperation Council (GCC), Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA), Asia Cooperation Dialogue (ACD), Heart of Borneo (HoB), Shanghai Cooperation Organization (SCO), Boao Forum for Asia, South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Central Asia Cooperation Organization (CACO), Economic Cooperation Organization (ECO), Initiative for Development in East Asia (IDEA), Australia-Indonesia Development Assistance (AIDA), Joint Policy Committee Indonesia-Northern Territory</i> dan Forum kerja sama lainnya di kawasan Asia Pasifik.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.03.02	Kawasan Afrika	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi, Kerjasama dan perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan kerjasama intrakawasan dan antarkawasan Afrika meliputi kerangka kerjasama dengan: <i>New Asian-African Strategic Partnerships (NAASP)</i> , Uni Afrika, <i>Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)</i> , <i>Economic Community of West African States (ECOWAS)</i> , <i>Southern African Development Community (SADC)</i> , <i>East Africa Community (EAC)</i> , <i>Southern African Customs Union (SACU)</i> , <i>Economic Community of Central African States (ECCAS)</i> , <i>Central African Economic and Monetary Community (CEMAC)</i> , <i>West African Economic and Monetary Union</i> , <i>Intergovernmental Authority on Development</i> , Liga Arab, <i>Asia Middle East Dialogue (AMED)</i> , <i>Gulf Cooperation Council (GCC)</i> , <i>Arab Maghreb Union</i> , dan Forum kerja sama lainnya di kawasan Afrika.
BK .04	Perundingan Kerja Sama Bilateral di kawasan Amerika dan Eropa	
BK.04.01	Kawasan Amerika	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Amerika, meliputi negara: Amerika Serikat, Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kanada, Kosta Rika, Meksiko, Nikaragua, Panama, Antigua and Barbuda, Argentina, Banamas, Barbados, Bolivia, Brazil, Chile, Dominika Persemakmuran, Ekuador, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Kolombia, Kuba, Paraguay, Peru, Republik Dominika, St. Kitts and Navis, St. Lucia, St. Vincent and The Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, dan Venezuela.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.04.02	Kawasan Eropa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan perundingan serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Eropa, meliputi negara: Andorra, Austria, Belanda, Belgia, Ceko, Hungaria, Inggris, Irlandia, Italia, Luksemburg, Malta, Monako, Polandia, Portugal, Perancis, San Marino, Spanyol, Siprus, Slovenia, Slovakia, Vatikan, Yunani, dan Albania, Armenia, Belarus Bulgaria, Bosnia dan Herzegovina, Denmark, Estonia, Finlandia, Georgia, Islandia, Jerman, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Montenegro, Makedonia Utara, Moldova, Norwegia, Rumania, Rusia, Serbia, Swedia, Swiss, Turki, dan Ukraina.
BK .05	Perundingan Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa	
BK.05.01	Kawasan Amerika	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi, Kerjasama dan Perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan kerjasama intrakawasan dan antarkawasan Amerika, meliputi kerangka kerja sama dengan: Energy Charter, FEALAC, Pacific Alliance, ALBA, UNASUR, MERCOSUR, OAS, CARICOM, SICA, ALADI, PARLACEN, CELAC, NAFTA, MIKTA, Community of Democracies, OECD, Arctic Council, Antarctic Treaty System, NATO, GUAM, dan Organisasi Kerja sama lainnya di kawasan Amerika.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.05.02	Kawasan Eropa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi, Kerjasama dan Perundingan, serta tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan kerjasama intrakawasan dan antarkawasan Eropa, meliputi kerangka kerja sama dengan: Uni Eropa, ASEM, Energy Charter, CERN, Energy Community, Eureka, European Science and Technology, COST, EFTA, Community of Democracies, OECD, Council of Europe, AER, NORDIC Council, Council of Baltic States, CIS, Commonwealth of Nations, CPLP, OIF, Arctic Council, Antarctic Treaty System, CSTO, OSCE, AITIC, Eurasian Economic Union, Union for the Mediterranean dan Organisasi Kerja sama lainnya di kawasan Eropa.
BK .06	Promosi Terpadu, Misi Bisnis, Misi Budaya dan Kegiatan sejenis lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan promosi terpadu, misi bisnis, misi budaya dan kegiatan sejenis lainnya di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.
BK .07	Isu dan Laporan Khusus	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan isu dan laporan khusus di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.
BK.08	Pemberian Panduan Substantif dan Fasilitasi Perundingan	
BK.08.01	Penyusunan Kertas Kerja	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kertas kerja dalam kerangka hubungan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
BK.08.02	Diseminasi Hasil Perundingan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan analisis data, dan penyiapan bahan promosi serta bahan diseminasi informasi hasil perundingan dalam kerangka hubungan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.
BK.09	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup hubungan bilateral, intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa.
KA	KERJA SAMA ASEAN	
KA.01.	Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.01.01	Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN	<p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama pilar politik keamanan ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN kerja sama dalam bidang kawasan netral, bebas dan damai (<i>Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN</i>), kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara (<i>South East Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEANWFZ</i>), kerja sama persahabatan/<i>Treaty of Aminty Cooperation (TAC)</i>, pertemuan Direktorat Jenderal ASEAN (<i>ASEAN Director General /ASEAN DGs</i>), CPR, analisis politik dan koordinasi <i>Senior Officials Meeting (SOM)</i>, <i>ASEAN Standing Committee (ASC)</i>, <i>Post Ministerial Conference (PMC)</i>, <i>ASEAN Ministerial Meetings (AMM)</i>, <i>Joint Consultative Meeting (JCM)</i> dan KTT ASEAN, Laut China Selatan, Penunjukan Dubes Asing untuk ASEAN, Keanggotaan Timor Leste di ASEAN, <i>ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework, Women, Peace and Security, ASEAN Outlook on the Indo Pacific, Development in Myanmar, Keketuaan ASEAN, ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)/ ASEAN Defence Senior Officials Meeting (ADSOM), ADMM-PLUS/ADSOM-PLUS, ASEAN Ministers Meeting on Transnational Crime (AMMTC)/ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime, ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matter , ASEAN Senior Official on Drugs Matter, ASEAN Maritime Forum (AMF), Expanded ASEAN Maritime Forum, ASEAN Regional Mine Action Centre, ASEAN Coasts Guards Forum.</i></p>

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.01.02	Kerja Sama Hukum dan Hak Azasi Manusia	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar politik Keamanan ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN kerja sama dalam bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan konsuler, <i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)</i> , <i>extradisi, privilege and immunity, mutual legal assistance</i> .
KA.01.03	Kerja Sama Forum, Lembaga Regional dan Entitas ASEAN	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama pilar politik Keamanan ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN kerja sama dalam bidang <i>ASEAN Regional Forum (ARF)</i> , lembaga regional dan entitas ASEAN seperti <i>ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)</i> , <i>ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)</i> , <i>ARF Security Policy Conference (ASPC)</i> , serta forum, lembaga regional dan entitas ASEAN lainnya
KA.02	Kerja Sama Ekonomi ASEAN	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.02.01	Investasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Jasa Ekonomi	<p>Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama pilar ekonomi ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN mengenai kerja sama dalam bidang ASEAN <i>Economic Minister (AEM)</i>, <i>Senior Economic Official Meetings (SEOM)</i>, <i>Initiative for ASEAN Integration (IAI)</i>, <i>ASEAN Single Window (ASW)</i>, perindustrian, investasi dan perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), <i>ASEAN Free Trade Area (AFTA)</i>, perdagangan bebas ASEAN dengan mitra, <i>Free Trade Agreement/Economic Partnership</i> dengan mitra eksternal ASEAN (RCEP), penyelesaian sengketa, perdagangan jasa, konstruksi, keuangan dan perbankan, kerja sama telekomunikasi dan digital, perhubungan dan telekomunikasi, konektivitas ASEAN, pariwisata, bea cukai, pembangunan.</p>

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.02.02	Komoditi dan Sumber Daya Alam	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama pilar ekonomi ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN mengenai kerja sama dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, energi, perikanan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan mineral dan sumber daya alam.
KA.02.03	Kerja Sama Subkawasan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN mengenai kerja sama dalam bidang Subkawasan Indonesia- Malaysia-Thailand <i>Growth Triangle</i> (IMT-GT), Subkawasan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines- East ASEAN <i>Growth Triangle</i> (BIMP-EAGA), dan Subkawasan ASEAN lainnya.
KA.03	Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.03.01	Kerja Sama Bidang Sosial	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN mengenai kerja sama dalam bidang perempuan dan anak, pemuda, olahraga, Yayasan ASEAN, Aparatur Sipil Negara, sosial, pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan, kependudukan dan kesehatan, pelayanan masyarakat dan tenaga kerja migran.
KA.03.02	Kerja Sama Bidang Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama pilar sosial budaya ASEAN meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemajuan identitas dan kesadaran mengenai ASEAN pada tingkat nasional serta pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan Masyarakat ASEAN mengenai kerja sama dalam bidang penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
KA.04	Kerja Sama Eksternal ASEAN	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.04.01	Kerja Sama Eksternal dengan Asia Timur	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal ASEAN di kawasan Asia Timur di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya meliputi kerja sama ASEAN dengan RRT, Jepang, Republik Korea (ROK), Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK), negara lainnya di Kawasan Asia Timur.
KA.04.02	Kerja Sama Eksternal dengan Asia Selatan, Afrika dan Pasifik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal ASEAN di kawasan Asia Selatan, Afrika, dan Pasifik, di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya meliputi kerja sama ASEAN dengan Australia, India, Selandia baru, Pakistan, Bangladesh, Fiji, Maroko, Mesir, Sri Lanka, negara lainnya di Kawasan Asia Selatan, Afrika dan Pasifik.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
KA.04.03	Kerja Sama Eksternal dengan Amerika, Eropa dan Kawasan Lainnya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal ASEAN di kawasan Amerika, Eropa, dan kawasan lainnya, di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya meliputi kerja sama ASEAN dengan Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Rusia, Norwegia, Swiss, Jerman, Turki, Negara Lainnya di Kawasan Amerika, Eropa dan kawasan lainnya.
KA.04.04	Kerja Sama Eksternal dengan Organisasi Regional dan Organisasi Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan perumusan, pelaksanaan, bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama eksternal ASEAN dengan organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya meliputi ASEAN <i>Plus Three</i> (APT), <i>East Asia Summit</i> (EAS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), <i>Economic Cooperation Organization</i> (ECO), <i>Gulf Cooperation Council</i> (GCC), <i>Mercado Comun del Sur/Common Market of the South</i> (MERCOSUR), <i>South Asia Association for Regional Cooperation</i> (SAARC), <i>Community of Latin American and Caribbean States</i> (CELAC), <i>Pacific Alliance</i> (PA) serta organisasi regional dan organisasi internasional lainnya.
TI	PENANGANAN ISU INTERNASIONAL	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.01	Pencalonan Indonesia pada Organisasi Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan mengenai pencalonan Indonesia maupun pencalonan negara lain dan posisi Indonesia berkaitan dengan berbagai pencalonan pada organisasi internasional.
TI.02	Peluang Kerja dan Pengadaan Barang dan Jasa pada Organisasi Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi lowongan jabatan dan urusan peluang pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Internasional.
TI.03	Kerja Sama Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	
TI.03.01	Keamanan Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama keamanan internasional dan perlucutan senjata meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu Keamanan Internasional meliputi: pencegahan dan penyelesaian konflik, konflik antar negara, konflik internal negara, operasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, kelembagaan keamanan internasional, bina perdamaian pasca konflik (<i>post-conflict peace building</i>).
TI.03.02	Perlucutan Senjata	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama keamanan internasional dan perlucutan senjata meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu perlucutan senjata meliputi: misi-misi politik khusus, perlucutan senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia, senjata konvensional.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.03.03	Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama keamanan internasional dan perlucutan senjata meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai Penanggulangan kejahatan lintas negara, meliputi: perdagangan manusia, penyelundupan manusia, narkoba, bali proses, UNCAC, <i>wild life crime</i> , IACA, CCPCJ, UNODC.
TI.03.04	Penanggulangan Terorisme	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama keamanan internasional dan perlucutan senjata meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai Penanggulangan terorisme meliputi : penanggulangan terorisme di dalam kerangka PBB dan di luar kerangka PBB serta kerja sama kelembagaan dan pengembangan kapasitas.
TI.03.05	Keamanan Siber	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama keamanan internasional dan perlucutan senjata meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai keamanan siber.
TI.04	Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.04.01	Hak-Hak Sipil dan Politik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hak asasi manusia dan kemanusiaan meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu hak-hak sipil meliputi: Pemajuan hak-hak sipil dan politik, perlindungan hak-hak sipil dan politik dan mekanisme hak-hak sipil dan politik.
TI.04.02	Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Pembangunan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hak asasi manusia dan kemanusiaan meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan pembangunan meliputi: pemajuan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan pembangunan, perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan pembangunan serta mekanisme hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan pembangunan.
TI.04.03	Hak-Hak Kelompok Rentan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hak asasi manusia dan kemanusiaan meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu hak-hak Kelompok rentan meliputi: hak perempuan, hak anak, hak pekerja migran, hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.
TI.04.04	Kemanusiaan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama hak asasi manusia dan kemanusiaan meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu kemanusiaan meliputi: humaniter, lembaga bantuan kemanusiaan, penanganan pengungsi dan <i>Internality Displaced Persons</i> , dampak kemanusiaan konflik internal.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.05	Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup	
TI.05.01	Ekonomi dan Keuangan Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu ekonomi dan keuangan internasional meliputi: organisasi pembangunan ekonomi PBB, lembaga keuangan internasional, G-20, pembangunan ekonomi badan-badan regional PBB, administrasi, anggaran dan koordinasi.
TI.05.02	Pembangunan Berkelanjutan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pembangunan berkelanjutan meliputi: pembangunan berkelanjutan global, pengurangan kemiskinan, pembiayaan pembangunan dan kegiatan operasional PBB.
TI.05.03	Pembangunan Sektoral	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pembangunan sektoral meliputi: kerja sama teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama infrastruktur dan komunikasi, energi dan sumber daya mineral, sumber daya kelautan dan kehutanan.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.05.04	Lingkungan Hidup	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu lingkungan hidup meliputi: lingkungan hidup dan pemukiman, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pendanaan global program lingkungan hidup.
TI.05.05	Kehutanan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu kehutanan.
TI.05.06	Kelautan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu kelautan.
TI.06	Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.06.01	Perdagangan Barang, Pengembangan Industri dan Investasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu perdagangan barang, pengembangan industri dan investasi yang meliputi: perdagangan barang non pertanian, kerja sama pengembangan industri, kawasan perdagangan bebas, kerja sama investasi dan isu-isu baru, <i>World Trade Organization</i> , kerja sama pengembangan ekonomi kreatif, kerja sama pengembangan ekonomi digital.
TI.06.02	Perdagangan Jasa dan Fasilitas Perdagangan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu perdagangan jasa dan fasilitas perdagangan yang meliputi: perdagangan jasa dan <i>e-commerce</i> , kerja sama perdagangan, akses <i>World Trade Organization</i> dan kajian perdagangan, fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah, kelembagaan dan peningkatan kapasitas.
TI.06.03	Pertanian dan Komoditi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pertanian dan komoditi yang meliputi: pertanian, komoditi pangan dan perkebunan, komoditi kehutanan dan pertambangan, komoditi kelautan dan dana bersama komoditi.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.06.04	Standarisasi, Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama perdagangan, perindustrian, komoditas dan kekayaan intelektual meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu standarisasi, hak kekayaan intelektual dan penyelesaian sengketa yang meliputi: standarisasi barang dan jasa, penanganan sengketa dan pengamanan perdagangan, penanganan hambatan teknis perdagangan dan hak kekayaan intelektual.
TI.07	Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	
TI.07.01	Pembangunan Sosial, Badan-Badan Khusus PBB dan Isu-isu Terkini	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB) meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB dan isu-isu terkini yang meliputi: pembangunan sosial, badan-badan khusus PBB, demokratisasi dan tata pemerintahan, isu-isu sains dan teknologi.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.07.02	Sosial Budaya dan Lembaga Non Pemerintah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB) meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu sosial budaya dan lembaga non pemerintah yang meliputi: kesehatan global, pendidikan, kebudayaan dan kepariwisataan, ketenagakerjaan internasional, lembaga antar negara dan organisasi internasional nonpemerintah.
TI.07.03	Organisasi Internasional Negara Berkembang	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB) meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu organisasi internasional negara berkembang yang meliputi: politik organisasi konferensi islam, ekonomi, sosial dan budaya organisasi konferensi islam, politik gerakan non blok, ekonomi, sosial dan budaya gerakan non blok.
TI.07.04	Kemitraan Selatan-Selatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud OINB) meliputi persiapan perumusan dan pelaksanaan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai isu organisasi internasional negara berkembang yang meliputi: kelompok 77, kelompok 15, kelompok D-8, kerja sama selatan-selatan.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
TI.08	Keanggotaan dan Kontribusi pada Organisasi Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi, kontribusi pencalonan dan dukungan keanggotaan, pelaksanaan pengkajian dan penetapan prioritas keanggotaan dan pembayaran kontribusi Indonesia serta pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional.
TI.09	Sidang Umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan perundingan dalam kerangka Sidang Umum PBB.
TI.10	Bencana Global	
TI.08.01	Bencana Alam	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kejadian dan penanggulangan bencana alam.
TI.08.02	Pandemi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyebaran dan penanggulangan wabah penyakit.
HI	HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	
HI.01	Perumusan Norma Hukum Nasional dan Perjanjian Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
HI.02	Pelaksanaan Perjanjian Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian pembuatan perjanjian bilateral, regional dan multilateral di bidang politik dan keamanan, kewilayahan dan kelautan, perdagangan, jasa ekonomi, investasi, keuangan, lingkungan hidup, kerja sama teknik, sosial, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan serta hukum privat internasional, yang meliputi: pembuatan Surat Kuasa (<i>Full Powers</i>), piagam pengesahan, proses perundingan, dan ratifikasi/pengesahan perjanjian termasuk penyelesaian sengketa.
HI.03	Advokasi Hukum dan Perjanjian Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan pelaksanaan pemberian advokasi di bidang hukum dan perjanjian internasional meliputi kegiatan bantuan teknis, hukum perdata internasional, perundingan penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa perjanjian internasional.
HI.04	Diseminasi, Publikasi Naskah Hukum dan Perjanjian Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan analisis data, kertas kerja dan laporan serta pengelolaan, pemantauan status dan penyiapan pelaksanaan sosialisasi serta publikasi naskah hukum dan perjanjian internasional.
HI.05	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembentukan dan penyempurnaan norma hukum nasional dan perjanjian internasional, koordinasi negosiasi pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional.
DM	INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
DM.01	Diplomasi Publik Bidang Politik dan Keamanan Luar Negeri	
DM.01.01	Bidang Politik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan diplomasi publik bidang politik.
DM.01.02	Bidang Keamanan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan diplomasi publik bidang keamanan.
DM.02	Diplomasi Publik Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
DM.02.01	Bidang Ekonomi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan diplomasi publik bidang ekonomi.
DM.02.02	Bidang Pembangunan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan diplomasi publik bidang pembangunan.
DM.03	Diplomasi Publik bidang Sosial dan Budaya	
DM.03.01	Bidang Sosial	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan diplomasi publik bidang sosial.
DM.03.02	Bidang Budaya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan diplomasi publik bidang budaya.
DM.04	Diplomasi Publik terhadap Isu Aktual dan Strategis	
DM.04.01	Strategis Kewilayahan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis diplomasi publik bidang strategis kewilayahan.
DM.04.02	Strategis Lokal	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis diplomasi publik bidang strategis lokal.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
DM.05	Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri	
DM.05.01	Ekonomi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik melalui pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri (<i>diaspora, friends of Indonesia</i>) dalam hal pendataan dan penggalangan ekonomi.
DM.05.02	Inovasi dan teknologi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik melalui pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri (<i>diaspora, friends of Indonesia</i>) dalam hal inovasi dan teknologi.
DM.05.03	Sosial Budaya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik melalui pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri (<i>diaspora, friends of Indonesia</i>) dalam hal sosial budaya.
DM.05.04	Pendidikan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik melalui pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri (<i>diaspora, friends of Indonesia</i>) dalam hal pendidikan.
DM.05.05	Filantropi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik melalui pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri (<i>diaspora, friends of Indonesia</i>) dalam hal filantropi.
DM.06	Penyelenggaraan Museum Konferensi Asia Afrika	

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
DM.06.01	Publikasi dan Promosi Nilai-Nilai Konferensi Asia Afrika	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan publikasi dan promosi nilai-nilai Konferensi Asia Afrika, meliputi kegiatan <i>Community Outreach</i> antara lain sosialisasi, pameran, seminar, pelayanan kunjungan, pelayanan penelitian dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan publikasi dan promosi nilai-nilai KAA.
DM.06.02	Pelestarian dan Dokumentasi Diplomasi Publik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan dokumentasi diplomasi publik, khususnya sejarah Konferensi Asia Afrika dan pengembangannya, antara lain kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan/restorasi, dan akuisisi benda koleksi, pengembangan perpustakaan, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelestarian benda koleksi dan dokumen sejarah KAA.
DM.07	Kerja Sama Pembangunan Internasional	
DM.07.01	Wilayah Asia dan Pasifik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kerja sama pembangunan internasional yang meliputi pemberian hibah, bantuan pembangunan, kerja sama teknik, pemberdayaan kapasitas kepada pemerintah asing dan lembaga asing di wilayah Asia dan Pasifik.
DM.07.02	Wilayah Amerika dan Eropa	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kerja sama pembangunan internasional yang meliputi pemberian hibah, bantuan pembangunan, kerja sama teknik, pemberdayaan kapasitas kepada pemerintah asing dan lembaga asing di wilayah Amerika dan Eropa.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
DM.07.03	Wilayah Afrika dan Timur Tengah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kerja sama pembangunan internasional yang meliputi pemberian hibah, bantuan pembangunan, kerja sama teknik, pemberdayaan kapasitas kepada pemerintah asing dan lembaga asing di wilayah Afrika dan Timur Tengah.
DM.07.04	Organisasi Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kerja sama pembangunan internasional yang meliputi pemberian hibah, bantuan pembangunan, kerja sama teknik, pemberdayaan kapasitas kepada pemerintah asing dan lembaga asing pada Organisasi Internasional.
DM.08	Kebijakan Pemberitaan	
DM.08.01	Pembuatan Berita	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang informasi dan media dalam hal pembuatan berita untuk keperluan penyampaian informasi dan pembentukan opini publik untuk kepentingan Republik Indonesia di dalam dan luar negeri.
DM.08.02	Pengelolaan Informasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang informasi dan media dalam hal liputan berita, media massa, kliping, transkripsi, dokumentasi kegiatan kementerian dan perwakilan, publikasi, pemanfaatan multimedia & media sosial, serta monitoring berita media asing dan nasional untuk keperluan penyampaian informasi dan pembentukan opini publik untuk kepentingan Republik Indonesia di dalam dan luar negeri.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
DM. 09	Fasilitasi Media Massa	
DM.09.01	Akreditasi Wartawan Asing	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi wartawan asing.
DM.09.02	Kerja Sama dengan Media	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan kerja sama dengan media.
DM.09.03	Layanan Wartawan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan layanan wartawan.
DM.10	Pelayanan Informasi Publik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan informasi publik.
AD	KEAMANAN DIPLOMATIK	
AD.01	Keamanan Diplomatik	
AD.01.01	Pengamanan Fisik	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan diplomatik.
AD.01.02	Pengamanan Informasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan informasi politik, hukum dan keamanan, serta ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka penyelenggaraan keamanan diplomatik.
AD.01.03	Pengamanan Personel	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan personel dalam pelaksanaan kegiatan sidang internasional di Indonesia atau kegiatan lainnya yang terkait dengan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan pengamanan personel perwakilan asing yang berkedudukan di Indonesia.
AD.02	Kerja Sama Keamanan Diplomatik	
AD.02.01	Kerja Sama Pengamanan Dalam Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama bidang keamanan diplomatik mengenai isu strategis dan kerja sama antar lembaga untuk pengamanan dalam negeri.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
AD.02.02	Kerja Sama Pengamanan Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama bidang keamanan diplomatik mengenai isu strategis dan kerja sama antar lembaga untuk pengamanan luar negeri.
AD.03	Perizinan Organisasi Kemasyarakatan Asing	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan pelaksanaan perizinan organisasi kemasyarakatan asing.
AD.04	Evaluasi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perwakilan rawan dan perwakilan berbahaya.
PK.	PROTOKOL DAN KONSULER	
PK.01	Layanan Keprotokolan	
PK.01.01	Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan keprotokolan yang meliputi pengaturan acara kenegaraan dan acara resmi Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri.
PK.01.02	Tamu Negara Asing	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan keprotokolan yang meliputi fasilitasi kedatangan dan keberangkatan, serta pengaturan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan dan jamuan dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi tamu negara asing di Indonesia.
PK.01.03	Dukungan Keprotokolan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan keprotokolan yang meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, serta tata penghormatan dalam acara resmi Menteri dan Wakil Menteri di dalam dan luar negeri.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
PK.01.04	Upacara Diplomatik dan Tanda Jasa Kehormatan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan keprotokolan yang meliputi pengaturan persiapan dan pelaksanaan upacara penyerahan Surat Kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia, upacara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada warga negara asing, pengaturan dan fasilitasi kehadiran Pejabat Negara setingkat Menteri sebagai tamu kehormatan pada resepsi diplomatik Perwakilan Negara Asing di Indonesia, fasilitasi penyambutan dan pelepasan di bandara bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat yang akan memulai dan yang telah mengakhiri misi diplomatik di Indonesia serta memperbarui data daftar tata urutan korps diplomatik asing di Indonesia.
PK.01.05	Pertemuan Internasional dan Kerja Sama Antar Lembaga	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan protokol mengenai pengaturan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan dalam pertemuan internasional di Indonesia yang dihadiri oleh Kepala Negara/Pemerintahan, Kepala Lembaga, Menteri, Pejabat Tinggi negara asing dan dalam acara lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang menghadirkan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia.
PK.02	Layanan Kekonsuleran	
PK.02.01	Layanan Paspor Diplomatik dan Dinas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pendataan dan pengawasan paspor diplomatik dan dinas Republik Indonesia, izin berangkat ke luar negeri (<i>exit permit</i>), rekomendasi visa diplomatik dan dinas.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
PK.02.02	Visa Diplomatik dan Dinas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan permohonan visa dari pejabat pemerintah/militer negara asing, tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan pejabat dari Organisasi Internasional yang diajukan melalui Perwakilan Republik Indonesia.
PK.02.03	Perizinan Tinggal Diplomatik dan Dinas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan izin tinggal diplomatik dan dinas, <i>Exit Permit Only</i> serta surat pengantar pengurusan izin tinggal biasa bagi warga negara asing di Indonesia dan pemegang surat perjalanan laksana paspor PBB.
PK.02.04	Perizinan Penerbangan, Pelayaran dan Legalisasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perizinan diplomatik bagi penerbangan dan pelayaran asing, penerbitan <i>exit permit only</i> , legalisasi dokumen asing yang akan digunakan di Indonesia dan dokumen Indonesia yang akan digunakan di luar negeri.
PK.02.05	Jasa Kekonsuleran Warga Negara Asing	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan notifikasi kekonsuleran warga negara asing bermasalah di Indonesia, fasilitasi akses kekonsuleran kepada Perwakilan Negara Asing yang berkaitan dengan masalah non-yudisial dan kerja sama kekonsuleran.
PK.03	Fasilitas Diplomatik	-
PK.03.01	Kendaraan Bermotor	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas diplomatik yang meliputi perizinan fasilitas kendaraan bermotor dan nomor polisi kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional serta pejabatnya, dan pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negara asing kepada Perwakilan Republik Indonesia.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
PK.03.02	Perpajakan dan Pengendalian Asas Resiprositas	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas diplomatik yang meliputi fasilitas perpajakan bagi perwakilan negara asing dan organisasi internasional, evaluasi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negara asing kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan fasilitas diplomatik yang dapat diberikan bagi perwakilan negara asing dan organisasi internasional di Indonesia serta data fasilitas berdasarkan asas resiprositas.
PK.03.03	Akreditasi dan Fasilitas Kunjungan Daerah	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas diplomatik yang meliputi status akreditasi, penerbitan kartu tanda pengenal, fasilitas kunjungan daerah, dan pelaksanaan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negara asing kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, perijinan dan pendampingan kunjungan daerah pejabat perwakilan asing dan organisasi internasional.
PK.03.04	Perijinan Bangunan, Senjata Api dan Alat Komunikasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas diplomatik yang meliputi perizinan penggunaan pesawat pemancar, frekuensi radio, senjata api untuk pengawal tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara asing, perizinan dan pengawasan terhadap pembelian dan penjualan properti, dan perizinan renovasi bangunan, serta pemantauan atas pemberian fasilitas perizinan dan bangunan bagi perwakilan negara asing dan organisasi internasional.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
PK.03.05	Barang Diplomatik dan Pas Bandara	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan fasilitas diplomatik yang meliputi pemantauan dan perizinan terhadap fasilitas pembebasan bea masuk barang, kantong diplomatik, dan pembuatan kartu kendali importasi minuman keras dan produk tembakau, dan penerbitan surat rekomendasi permohonan pas bandara dan pelabuhan bagi perwakilan negara asing dan pejabatnya, serta evaluasi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negara asing kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
PK.04	Pemberian Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI)	
PK.04.01	Penyelesaian Kasus Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian pelindungan diplomatik dan konsuler, bantuan sosial, pemberian bantuan hukum, fasilitasi layanan kesehatan, fasilitasi pemulangan, pemberian bantuan penampungan sementara, dan evakuasi di luar negeri.
PK.04.02	Kelembagaan dan Diplomasi Pelindungan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan pelindungan warga Indonesia di luar negeri yang meliputi penguatan kelembagaan dan pengembangan kerja sama sama melalui harmonisasi regulasi dan kebijakan, penyusunan dan pengelolaan kerja sama di tingkat nasional dan internasional, kerja sama pelindungan WNI meliputi <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , <i>Letter of Intent (LoI)</i> , <i>agreement</i> lainnya, pemantauan dan evaluasi pelayanan dan pelindungan WNI di Perwakilan, serta penyelenggaraan pelatihan dan kampanye penyadaran publik.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
PK.04.03	Sistem dan Teknologi Informasi Pelayanan Kekonsuleran dan Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi pelayanan kekonsuleran dan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri melalui pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan kerja sama pemanfaatan dan interoperabilitas serta laporan pengelolaan sistem pelayanan kekonsuleran dan pelindungan WNI.
PK.04.04	Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan Award (HWPA)	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penghargaan di bidang pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
SJ.	STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI	
SJ.01	Perumusan Kebijakan Teknis Rencana dan Program	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis rencana, kinerja dan program strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kawasan Asia Pasifik dan Afrika, kawasan Amerika dan Eropa, multilateral dan isu khusus.
SJ.02	Analisis dan Pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis strategi kebijakan yang meliputi izin pengkajian dan pengembangan, data primer dan tinjauan pustaka, pengolahan data, analisis data dan laporan hasil kajian/pengembangan serta pemberian rekomendasi kebijakan dan isu khusus di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kawasan Asia Pasifik dan Afrika kawasan Amerika dan Eropa, multilateral dan isu khusus.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
SJ.03	Kerja Sama Kajian	
SJ.03.01	Kerja Sama Kajian dengan Universitas Dalam Negeri dan Luar Negeri	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama kajian yang meliputi perjanjian kerja sama dan hasil kajian dengan universitas dalam negeri dan luar negeri di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
SJ.03.02	Kerja Sama Kajian dengan Lembaga Dalam Negeri, Luar Negeri (ICWA) dan Lembaga Internasional	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama kajian yang meliputi perjanjian kerja sama dan hasil kajian dengan lembaga dalam negeri, luar negeri (ICWA) dan lembaga internasional di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
SJ.03.03	Kerja Sama Sinkronisasi Data Analisis	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama sinkronisasi data analisis, hasil rekomendasi strategi kebijakan dan isu khusus, serta hasil penetapan strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
SJ.04	Kertas Kerja Strategi Kebijakan dan Isu Khusus	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan kertas kerja strategi kebijakan dan isu khusus.
SJ.05	Publikasi dan Diseminasi Informasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan publikasi serta diseminasi informasi yang meliputi laporan koordinasi, laporan hasil diseminasi dan debriefing.

KLASIFIKASI ARSIP	INDEKS	URAIAN
SJ.06	Pemantauan dan Evaluasi	Arsip atau rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan strategi kebijakan dan isu khusus di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kawasan Asia Pasifik dan Afrika, kawasan Amerika dan Eropa, multilateral.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

RETNO L. P. MARSUDI